



Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan

Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, Amran Achmad, Wahyudi dan Akhmad Tako

Forests and Governance Programme Series

1. a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004
Jason M. Patlis
b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004
Jason M. Patlis
2. Desentralisasi ancaman dan harapan bagi masyarakat adat. 2004
Hendra Gunawan
3. Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia. 2004
Emile Jurgens, Christopher Barr, Christian Cossalter
4. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebelu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
Catur Budi Wiati
5. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Eddy Mangopo Angi
6. Integrasi hak pemanfaatan tanah masyarakat Dayak dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.
Mayang Meilantina
7. Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum?
Gusti Z. Anshari

Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan

Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara,
Sulawesi Selatan

Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin, Amran Achmad,
Wahyudi dan Akhmad Tako

© 2006 oleh Center for International Forestry Research
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Diterbitkan tahun 2006
Dicetak oleh Intiprima Karya, Jakarta

ISBN 979-24-4666-4

Foto oleh Putu Oka Ngakan
Desain dan tata letak oleh Vidya Fitriani

Diterbitkan oleh
Center for International Forestry Research
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel.: +62 (251) 622622
Fax.: +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

Daftar Isi

Daftar Singkatan	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	ix
Pendahuluan	1
Metode	3
Lokasi dan Waktu Penelitian	3
Survei Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan	3
Survei Potensi Rotan dan Kayu	5
Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Sumberdaya Hayati Hutan	5
Hasil	6
Profil Dusun Pampli dan Hutan Tempat Bergantung Hidup	6
<i>Lokasi Dusun Pampli dan Aksesibilitas</i>	6
<i>Jumlah Penduduk dan Pendidikan</i>	6
<i>Kawasan Hutan Tempat Mengambil Hasil Hutan</i>	6
Ketergantungan Masyarakat terhadap Hasil Hutan	8
Sumber Pendapatan Lain dan Karakteristik Sosial Masyarakat	10
<i>Sawah, Kebun dan Lahan Pekarangan</i>	10
<i>Masa Depan yang Tidak Dipersiapkan</i>	11
<i>Sistem Kekeluargaan yang Menghambat</i>	12
Potensi dan Kontribusi Sumberdaya Hayati Hutan pada Masyarakat	13
<i>Hasil Hutan Kayu</i>	13
<i>Hasil Hutan Bukan Kayu: Rotan</i>	16
<i>Hasil Hutan Bukan Kayu: Kayu bakar sebagai sumber energi utama</i>	19
<i>Hasil Hutan Bukan Kayu: Udang dan ikan di Sungai Patikala</i>	19
<i>Hasil Hutan Bukan Kayu: Sayuran dan obat-obatan</i>	20
Persepsi dan Partisipasi Masyarakat	21
<i>Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan</i>	21
<i>Partisipasi Masyarakat terhadap Kelestarian Sumberdaya Hayati Hutan</i>	21
Penebangan Pohon dan Pemungutan Rotan oleh Masyarakat	22
<i>Lokasi Penebangan Pohon</i>	23
<i>Lokasi Pemungutan Rotan</i>	23
Organisasi Kelompok dan Kemitraan dengan Perusahaan	24
<i>Organisasi dan Model Kemitraan Kelompok Pengambil Kayu</i>	24
<i>Organisasi dan Model Kemitraan Kelompok Pemungut Rotan</i>	24

Kebijakan Pemerintah tentang Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Hutan	26
<i>Ketentuan Perijinan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan</i>	26
<i>PSDH dan Retribusi Kayu</i>	27
<i>PSDH dan Retribusi Rotan serta Kaitannya dengan Harga Rotan</i>	27
Gender dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Hutan	28
Pembahasan	30
Hutan sebagai Sumber Penghidupan Masyarakat	30
Mengapa Masyarakat Hutan Umumnya Miskin	31
Rantai Perdagangan yang Panjang dan Rendahnya Harga Rotan	32
Ketidakberpihakan Pemerintah kepada Masyarakat Pemungut Rotan	32
Masa Depan Hasil Hutan Rotan di Desa Sepakat	33
Kesimpulan dan Rekomendasi	34
Kesimpulan	34
Rekomendasi	34
Daftar Pustaka	36

Daftar Tabel & Gambar

Tabel

1. Sumberdaya hayati yang ada di dalam hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Pampli	9
2. Jenis pekerjaan dari 12 kepala keluarga yang diamati	9
3. Kepemilikan lahan kebun dan jenis tanaman yang ada di dalamnya	10
4. Kepemilikan barang berharga/hiburan di antara 12 orang responden kepala keluarga	11
5. Hasil kerja satu kelompok pemungut rotan dari Desa Sepakat selama 48 hari di hutan (1 September sampai 17 Oktober 2005)	12
6. Hasil kerja satu kelompok pemungut rotan dari Desa Lantantallang selama 16 hari di hutan (9 sampai 24 September 2005)	12
7. Potensi kayu per 2 ha dari semua jenis pohon berdiameter lebih dari 30 cm yang ada pada tiga lokasi persebaran plot (Loppeng, Minoto, dan Tobarani)	14
8. Gambaran hasil kerja kelompok penebang kayu yang dirangkum dari hasil wawancara dengan 5 kelompok	15
9. Jumlah dan nilai kayu yang dihasilkan dari hutan selama 1 bulan, antara 21 September - 20 Oktober 2005	15
10. Jenis-jenis rotan yang ditemukan di hutan sekitar Dusun Pampli dan harga basah di tingkat masyarakat bulan Oktober 2005	16
11. Potensi rotan per 2 ha pada 3 lokasi: Loppeng (dekat kampung), Tobarani (terjauh dari kampung), dan Minoto (di antara Loppeng dan Tobarani)	17
12. Hasil rotan dari 96 orang pemungut rotan yang tergabung dalam 11 kelompok dalam kurun waktu 5 minggu (23 September - 29 Oktober 2005)	19
13. Beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Pampli sebagai sayuran dan obat-obatan	20
14. Persepsi masyarakat Dusun Pampli terhadap sumberdaya hayati hutan tempatnya bergantung hidup	21
15. Tingkat partisipasi masyarakat Dusun Pampli terhadap upaya menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati hutan	22
16. Persentase perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam beberapa macam pekerjaan	29
17. Harga beli rotan batang dan lambang kering goreng kategori asalan pada tingkat pengumpul di kota Makassar	32

Gambar

1. Peta Kabupaten Luwu Utara menunjukkan sebaran lokasi ijin rotan pada akhir tahun 2005	4
2. Peta wilayah DAS Patikala yang merupakan tempat masyarakat Dusun Pampli memungut rotan	7
3. Status kawasan hutan di dalam DAS Patikala dan sebaran pondok pemungut rotan	8
4. Rotan yang dipotong dalam sehari oleh seorang pemungut rotan di daerah Minoto (kiri) dan Loppeng (kanan). Selain muda, rotan yang diambil di Loppeng nampak lebih pendek	18
5. Serok yang digunakan kaum perempuan untuk menangkap udang	20
6. Bagan aliran uang pinjaman/panjar dan penjualan rotan dari pemungut rotan kepada pengusaha pemegang ijin	25
7. Besarnya PSDH kayu menurut kelompok jenis	27
8. Besarnya PSDH rotan menurut kelompok	27
9. Ibu-ibu rumah tangga bekerja mengangkut kayu balak	28

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APL	Areal Penggunaan Lain
DAS	Daerah Aliran Sungai
Dinas Hutbun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
IPHH	Izin Pemungutan Hasil Hutan
IPK	Izin Pemanfaatan Kayu
KK	Kepala Keluarga
LHP	Laporan Hasil Produksi
P2LHP	Pengawas Penguji Laporan Hasil Produksi
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
PSDH	Provisi Sumberdaya Hutan
Perda	Peraturan Daerah
SD	Sekolah Dasar
SK	Surat Keputusan
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TPI	Tebang Pilih Indonesia
Tanah ongko	Lahan yang diklaim sebagai miliknya

Kata Pengantar

Laporan akhir penelitian kasus dengan judul **“Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan”** ini merupakan pertanggungjawaban atas realisasi kerjasama penelitian antara the Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang hasilnya disajikan dalam laporan ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang bertema *“Can Decentralization Work for Forest and the Poor? Policy Research to Promote Sustainable Forest Management, Equitable Economic Development, and Secure Local Livelihoods in Indonesia”*.

Lokasi Penelitian ini adalah Dusun Pampli, Desa Sepakat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dimulai sejak awal September 2005 sampai akhir November 2005. Metode penjarangan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, terutama kelompok pemungut rotan dan masyarakat Desa Sepakat secara umum, pengusaha pemegang ijin dan perantara, staf Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, khususnya Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, dan instansi teknis terkait. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas berbagai informasi yang telah diberikan selama penelitian. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Gunawan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan yang telah membaca ulang dan memberikan banyak masukan terhadap laporan ini.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada CIFOR dan European Union (EU) melalui Program Biodiversity and Livelihoods yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan penelitian ini. Secara khusus, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Doris Capistrano PhD, Direktur Forests and Governance Programme, beserta staf Sdri. Yunety Tarigan, atas nasehat dan bantuannya sejak dimulainya penelitian sampai laporan ini diterbitkan.

Semoga informasi yang tertuang dalam laporan hasil penelitian kasus ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Semua pendapat yang tertuang dalam laporan ini merupakan pandangan pribadi para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi lembaga.

Abstrak

Fokus dari penelitian ini adalah ketergantungan masyarakat Dusun Pampli Desa Sepakat Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sumberdaya hayati hutan serta perikehidupan sosial mereka dalam kaitannya dengan kepedulian mereka pada sumberdaya hayati hutan tempatnya bergantung hidup. Penelitian ini diselenggarakan selama 3 bulan mulai September sampai dengan November 2005. Beberapa variable utama yang diamati adalah ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hayati hutan, perilaku sosial masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan, potensi hasil hutan kayu dan rotan, persepsi masyarakat terhadap hutan dan partisipasi mereka dalam menjaga keberlanjutan hasil hutan, peranan perempuan dalam pemanfaatan hasil hutan, serta kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan. Informasi dari masyarakat dijarah dengan menggunakan metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA), sedangkan data potensi hasil hutan disurvei di dalam 61 plot masing-masing berukuran 0.1 ha. Perilaku masyarakat dalam mengumpulkan atau memanen hasil hutan diamati dengan mengikuti kegiatan mereka di dalam hutan.

Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan masyarakat Dusun Pampli terhadap hasil hutan adalah sangat besar. Hasil hutan yang mereka manfaatkan adalah, berturut-turut dari yang paling banyak: rotan, kayu bahan bangunan, kayu bakar, sayuran dan obat-obatan, serta udang dan ikan. Semua laki-laki dewasa di Dusun Pampli pernah bekerja sebagai pemungut rotan. Selain beras yang mereka hasilkan dari sawah, hampir semua kebutuhan hidup lainnya mereka penuhi dari bekerja mengumpulkan hasil hutan, terutama rotan. Hutan tempat

masyarakat Dusun Pampli dan dusun sekitarnya mengambil hasil hutan merupakan satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) Patikala yang luasnya sekitar 33.829 ha, namun yang efektif mereka gunakan untuk memungut rotan hanya sekitar 13.178 ha. Dari dalam kawasan hutan tersebut, dalam kurun waktu 5 minggu, masyarakat Dusun Pampli dan dusun sekitarnya berhasil mengeluarkan rotan sebanyak 100.383 kg dengan nilai jual Rp. 68.804.925. Seorang pemungut rotan dewasa yang kuat dapat mengumpulkan rotan senilai lebih dari satu juta rupiah dalam kurun waktu 3 minggu. Namun sayang sekali bahwa, masyarakat Dusun Pampli umumnya memiliki semangat kerja yang sangat rendah, sehingga mereka terbelenggu dalam kemiskinan di antara berlimpahnya sumberdaya hutan.

Dari ketergantungannya terhadap sumber daya hutan, masyarakat Dusun Pampli memiliki persepsi yang baik terhadap hutan yang ada di sekitar kampung tempat mereka tinggal. Namun persepsi yang baik tersebut ternyata tidak diikuti dengan partisipasi yang baik dalam menjaga keberlanjutan keberadaan sumberdaya hayati hutan. Latar belakang pendidikan yang rendah serta keinginan untuk menikmati manfaat dari hutan yang sebesar-besarnya tanpa upaya yang maksimal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan tempatnya bergantung hidup. Rendahnya tingkat pendidikan juga membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan harga jual hasil hutan mereka secara wajar. Masyarakat Dusun Pampli membutuhkan bantuan bimbingan dan keberpihakan kebijakan dari pemerintah serta pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat untuk dapat terlepas dari pola pikir dan gaya hidup yang menjerumuskannya ke dalam kemiskinan.

Pendahuluan

Sejak hutan alam di Indonesia mulai dieksploitasi secara besar-besaran di akhir tahun 1960an, selama hampir dua setengah dekade, hasil hutan - terutama kayu - tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi. Ironisnya, walaupun devisa yang dihasilkan dari hutan saat itu nilainya milyaran US dollar, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan tetap miskin. Mereka justru cenderung menjadi semakin miskin karena hutan tempatnya bergantung hidup kian rusak. Lemahnya pengawasan oleh pemerintah telah menyebabkan sebagian besar, kalau bukan seluruhnya, pengusaha pemegang ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan pembalakan hutan tanpa memperhatikan azas kelestarian hasil sesuai ketentuan sistem silvikultur (Tebang Pilih Indonesia, TPTI dan lain sebagainya). Sebagai akibatnya, degradasi hutan terjadi dimana-mana dan produksi kayu hutan alam pun terus menurun, terutama sejak sekitar pertengahan tahun 1990an (FWI/GFW, 2001).

Walaupun hasil hutan kayu terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi negara, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai “*major forest product*”, hasil hutan lainnya yang dikenal dengan sebutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), mungkin akan lebih bernilai dalam jangka panjang. Di India, Gupta dan Guleria (1982) melaporkan bahwa HHBK mencapai nilai 63 persen dari total ekspor hasil hutan negara tersebut. Adapun nilai HHBK yang diekspor Pemerintah Indonesia mencapai US\$ 200 juta per tahun (Gillis, 1986). Berbeda dengan kayu, HHBK umumnya dikelola oleh masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Oleh karena itu, selain menjadi sumber devisa negara, HHBK seperti rotan, daging binatang, madu, damar, gaharu, getah, berbagai macam minyak tumbuhan,

bahan obat-obatan, dan lain sebagainya juga merupakan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Kerusakan hutan, baik yang disebabkan oleh praktek pembalakan yang tidak memperhatikan azas kelestarian hasil maupun oleh konversi lahan hutan, bukannya menyebabkan menurunnya hasil hutan kayu, tetapi juga HHBK. Masyarakat Dusun Pampli, Desa Sepakat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang sebagian besar hidupnya bergantung dari memungut rotan, menyatakan bahwa, pembalakan hutan oleh perusahaan HPH telah menyebabkan menurunnya potensi rotan dan sumberdaya hayati hutan lainnya di hutan sekitar dusun mereka (Ngakan *et. al.*, 2005). Pada masa lalu, dalam sehari pulang pergi ke hutan mereka dapat mengumpulkan rotan dalam jumlah yang cukup, tetapi sekarang mereka harus bermalam berhari-hari (sering lebih dari 1 bulan) di dalam hutan. Penebangan pohon dan penyaradan kayu log oleh perusahaan HPH telah memporakporandakan rumpun-rumpun rotan.

Aktivitas pembalakan tentunya sedikit banyak berdampak pada rusaknya rumpun rotan, namun menurunnya populasi rotan di dalam hutan sekitar Dusun Pampli mungkin tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas pembalakan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai teknik pemungutan rotan secara lestari yang dapat memberikan kesempatan untuk terjadinya regenerasi secara alami dan rendahnya kesadaran untuk melakukan penanaman dapat juga menjadi penyebab menurunnya potensi rotan. Hal yang sama juga terjadi dalam pemungutan jenis HHBK lainnya.

Banyak orang berbicara dan yakin mengenai kearifan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitar tempat

hidup mereka. Namun, nampaknya kearifan masyarakat lokal tersebut sangat bervariasi menurut tempat dan waktu. Kearifan juga akan dipandang sebagai hal yang berbeda oleh pengamat yang memiliki perspektif yang berbeda. Masyarakat lokal yang umumnya berpendidikan rendah sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar yang sering konsumtif. Untuk mendukung gaya hidup konsumtif dibutuhkan sumberdaya yang besar, yang akhirnya mengakibatkan seseorang tidak lagi dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara arif dan bijak. Sebagai contoh, menurunnya potensi ikan pada ekosistem terumbu karang disebabkan oleh pengeboman yang justru dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa mengeluarkan tenaga yang besar.

Semakin terbukanya isolasi masyarakat lokal terhadap pengaruh luar sangat memberikan dampak. Mungkin saja apa yang selama ini dianggap sebagai suatu pola pemanfaatan sumberdaya yang arif dari sisi budaya lokal, ternyata tidak demikian dari perspektif

konservasi dan pola pemanfaatan berkelanjutan. Sudah saatnya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan konservasi untuk tidak semata-mata terlena dengan konteks kearifan lokal masa lalu, tetapi perlu kembali melakukan kajian tentang pola-pola pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal. Hal ini penting bukan saja bagi kelestarian sumberdaya alam hayati itu sendiri, melainkan juga untuk menjaga ketersediaan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Tulisan ini merupakan laporan hasil penelitian tentang kehidupan masyarakat Dusun Pampli Desa Sepakat yang bergantung pada sumberdaya hayati hutan dan upaya mereka dalam menjaga kelestariannya. Untuk menggambarkan sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hayati hutan, laporan ini juga mengulas sumber-sumber pendapatan masyarakat lainnya, selain dari sumberdaya hayati hutan serta tata cara mereka mengelola baik sumberdaya hayati hutan maupun sumber-sumber pendapatan mereka yang lain.

Metode

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pampli, Desa Sepakat, Kabupaten Luwu Utara (Gambar 1). Pemilihan Dusun Pampli sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dusun ini bermatapencaharian sebagai pemungut hasil hutan, khususnya rotan. Masyarakat Dusun Pampli dijadikan sebagai responden utama, namun pengamatan juga dilakukan terhadap masyarakat Desa Sepakat secara umum dan masyarakat Desa Lantantallang (desa tetangga) yang juga memungut rotan pada lokasi yang sama. Pengumpulan data dimulai sejak awal bulan September sampai dengan akhir November 2005.

Survei Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan

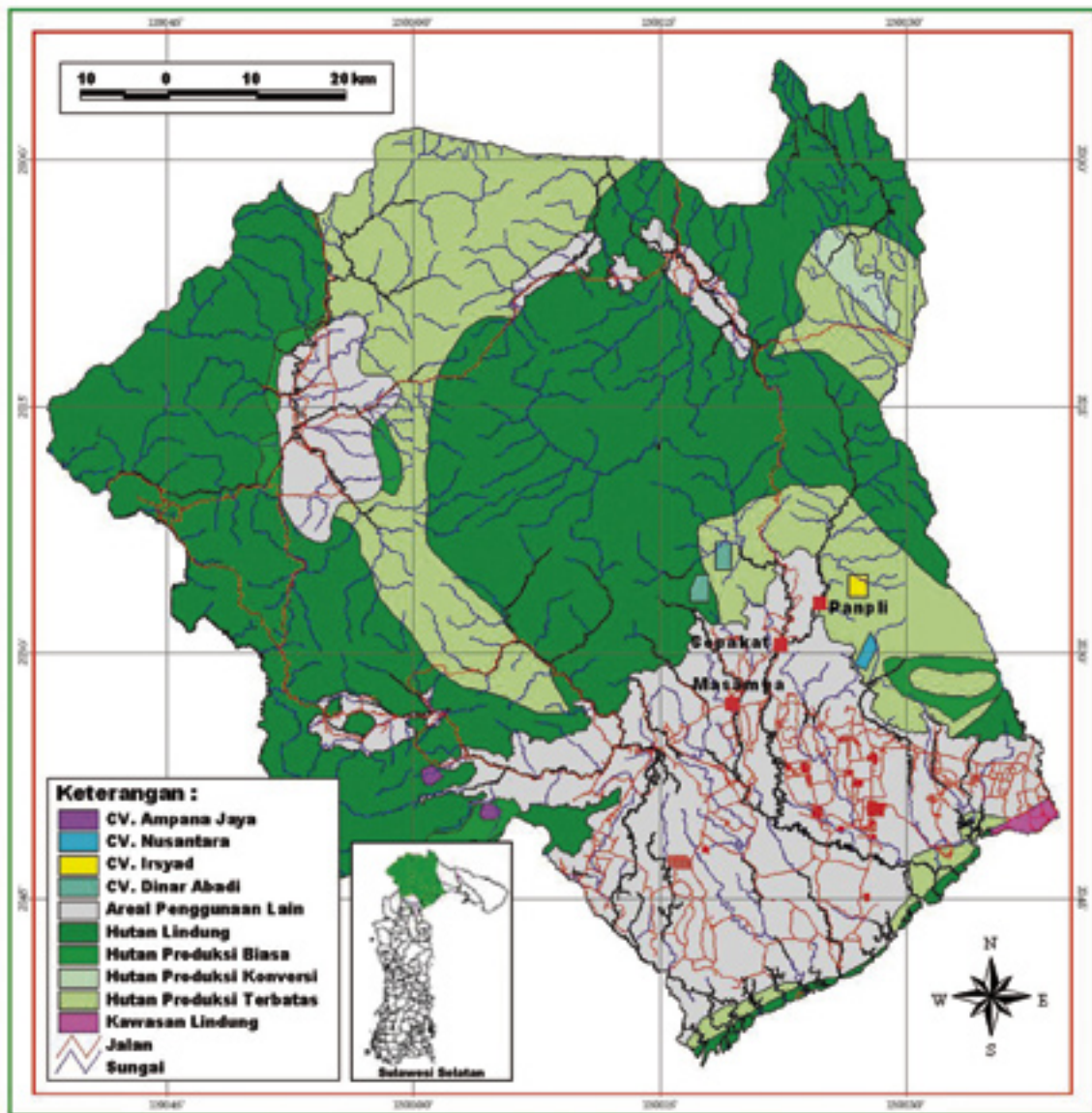
Masyarakat Dusun Pampli rata-rata berpendidikan rendah. Dengan demikian, penjangkaran informasi dengan cara metode kuesioner dikhawatirkan dapat menghasilkan data dengan tingkat bias yang cukup tinggi. Sebagai upaya untuk memperoleh data yang akurat, digunakan metoda PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Khusus untuk penjangkaran informasi dengan metoda PRA ini, dua orang staf peneliti ditempatkan di Desa Sepakat sejak tanggal 16 September sampai dengan 20 Oktober 2005. Informasi yang dijangkarkan dengan menggunakan metoda PRA antara lain:

a. Pendidikan dan karakteristik sosial masyarakat. Pengamatan dilakukan terutama terhadap tingkat pendidikan masyarakat dan kendala untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkaitan dengan karakteristik sosial, pengamatan dilakukan terhadap pola interaksi sosial masyarakat,

khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya hayati hutan.

- b. Tingkat ketergantungan pada sumberdaya hayati hutan dan sumber-sumber lainnya. Berapa besar masyarakat memperoleh pendapatan dari hasil hutan dan bagaimana pendapatan mereka dari sumber lainnya?
- c. Kepemilikan lahan oleh masyarakat dan penggunaannya. Pengamatan dilakukan terhadap bentuk-bentuk dan luas kepemilikan lahan masyarakat dan bagaimana mereka memanfaatkan lahan tersebut, termasuk teknik bertani?
- d. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati yang ada di hutan sekitar dusun mereka.
- e. Pembagian tugas kerja antara laki-laki dan perempuan serta beberapa informasi lainnya yang menunjang analisis hasil penelitian.

Diskusi yang dihadiri oleh 17 orang responden kepala keluarga dari Dusun Pampli diselenggarakan untuk mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumberdaya hayati hutan tempatnya bergantung hidup. Untuk mengetahui persepsi masyarakat, kepada mereka diberikan lima topik untuk dibahas dan jawaban mereka dibedakan dalam tiga kategori: (a) persepsi baik, apabila mereka memahami dengan baik bahwa dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan dan menginginkan agar sumberdaya tersebut dikelola secara lestari; (b) persepsi sedang, apabila mereka menyadari dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan tetapi tidak memahami kalau sumberdaya tersebut perlu dikelola secara lestari agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan; (c) persepsi tidak baik, apabila jawaban responden masuk dalam kategori tidak sadar



Gambar 1. Peta Kabupaten Luwu Utara menunjukkan sebaran lokasi ijin rotan pada akhir tahun 2005

kalau dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan, atau ada kepentingan lain yang membuat mereka cenderung beranggapan bahwa tidak perlu menjaga kelestarian sumberdaya hayati hutan.

Partisipasi masyarakat diketahui dari apa yang telah dan akan mereka lakukan dalam turut menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati hutan sebagai tempatnya bergantung hidup. Dari lima topik diskusi yang diberikan kepada 17 responden, jawaban mereka juga dibedakan menjadi tiga kategori: (a) berpartisipasi aktif, apabila mereka secara sadar dan aktif telah dan akan melakukan upaya atau tindakan-tindakan untuk menjaga keberlanjutan

ketersediaan sumberdaya hayati hutan yang ada di sekitar kampung mereka; (b) pasif, apabila mereka berpikir bahwa harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati hutan di sekitar kampung mereka, tetapi mereka tidak pernah terlibat aktif dan berharap agar pemerintah atau pihak lain yang melakukannya; (c) negatif, apabila mereka tidak pernah berpikir untuk mempertahankan ketersediaan sumberdaya hayati hutan, sebaliknya justru selalu berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan merusak sumberdaya hayati hutan.

Survei Potensi Rotan dan Kayu

Survei potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu dilaksanakan di dalam wilayah DAS Patikala yang merupakan tempat mencari hasil hutan oleh masyarakat Dusun Pampli. Plot-plot pengamatan ditempatkan pada tiga lokasi berdasarkan jaraknya dari dusun: di hutan sekitar dusun (Loppeng), di hutan yang merupakan lokasi memungut rotan terjauh (Tobarani), dan diantara dua lokasi tersebut (Minoto) (Gambar 2). Di lokasi terdekat dan terjauh ditempatkan secara sistematis sebanyak 20 plot berbentuk lingkaran dengan ukuran 0,1 ha. Sementara di Tobarani, ditempatkan sebanyak 21 plot. Seluruh pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm (sudah dapat ditebang oleh pengambil kayu) dicatat nama jenisnya dan diukur diameter serta tinggi bebas cabangnya. Volume kayu dihitung dengan mengalikan luas bidang dasar dengan tinggi bebas cabang dan faktor koreksi sebesar 0,7. Setiap rumpun rotan yang ditemukan dalam setiap plot dicatat nama jenisnya. Individu rotan yang belum memiliki bagian batang bernilai ekonomi (laku dijual) dikelompokkan sebagai anak-anak dan hanya dihitung jumlah individunya, sedangkan individu yang telah bernilai ekonomi diukur panjang batang yang bernilai ekonomi.

Penelitian potensi ini diselenggarakan mulai tanggal 16 September sampai 1 Oktober 2005 oleh 3 orang staf peneliti bidang vegetasi.

Untuk mengetahui teknik pemanenan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat, tim peneliti mengunjungi lokasi-lokasi penebangan rotan dan kayu oleh masyarakat di dalam hutan. Prosedur yang mereka lakukan dalam mengumpulkan/memanen hasil hutan tersebut dicatat.

Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Sumberdaya Hayati Hutan

Beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten dan *stakeholders* terkait dengan sektor kehutanan diwawancarai guna mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap pemungutan/pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu, oleh masyarakat. Diskusi juga dilakukan berkaitan dengan kebijakan yang mereka terapkan selama ini dan dasar-dasar pertimbangan mereka menerapkan kebijakan tersebut. Semua peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan sumberdaya hayati hutan dikumpulkan dan dianalisis dalam kaitannya dengan hasil penelitian.

Hasil

Profil Dusun Pampli dan Hutan Tempat Bergantung Hidup

Lokasi Dusun Pampli dan Aksesibilitas

Dusun Pampli adalah salah satu Dusun dari Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Dusun ini berjarak sekitar 14,7 km dari Kota Masamba (ibukota Kabupaten Luwu Utara). Baik kendaraan roda dua maupun roda empat, seperti truk pengangkut kayu atau rotan, dapat melewati jalan pengerasan menuju Dusun ini. Namun, karena jalannya belum diaspal dan kondisinya sangat rusak, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dusun yang berbatasan dengan hutan tersebut dapat mencapai 30 menit.

Dusun Pampli berlokasi di daerah Kaluku Desa Sepakat dan oleh karena itu terkadang ada yang menyebutnya sebagai Kampung Kaluku. Dusun yang berlokasi di pinggir Sungai Patikala (cabang Sungai Baliase) tersebut diberi nama Pampli karena menempati bekas *base-camp* HPH PT Panply. Di sekitar Dusun Pampli terdapat hamparan persawahan dan perkebunan. Kebun-kebun dan sawah-sawah tersebut bukan hanya milik warga Dusun Pampli, melainkan ada yang dimiliki oleh warga Desa Sepakat dari dusun lainnya.

Jumlah Penduduk dan Pendidikan

Penduduk Dusun Pampli berjumlah 148 orang yang terdiri dari 37 KK, dari sekitar 1044 orang atau 231 KK penduduk Desa Sepakat¹. Selain rumah-rumah yang mereka tinggali di Dusun Pampli, masyarakat juga memiliki rumah di pusat Desa Sepakat yang berjarak sekitar 3,5 km dari Dusun tersebut. Dilihat dari kemudahan pergi ke

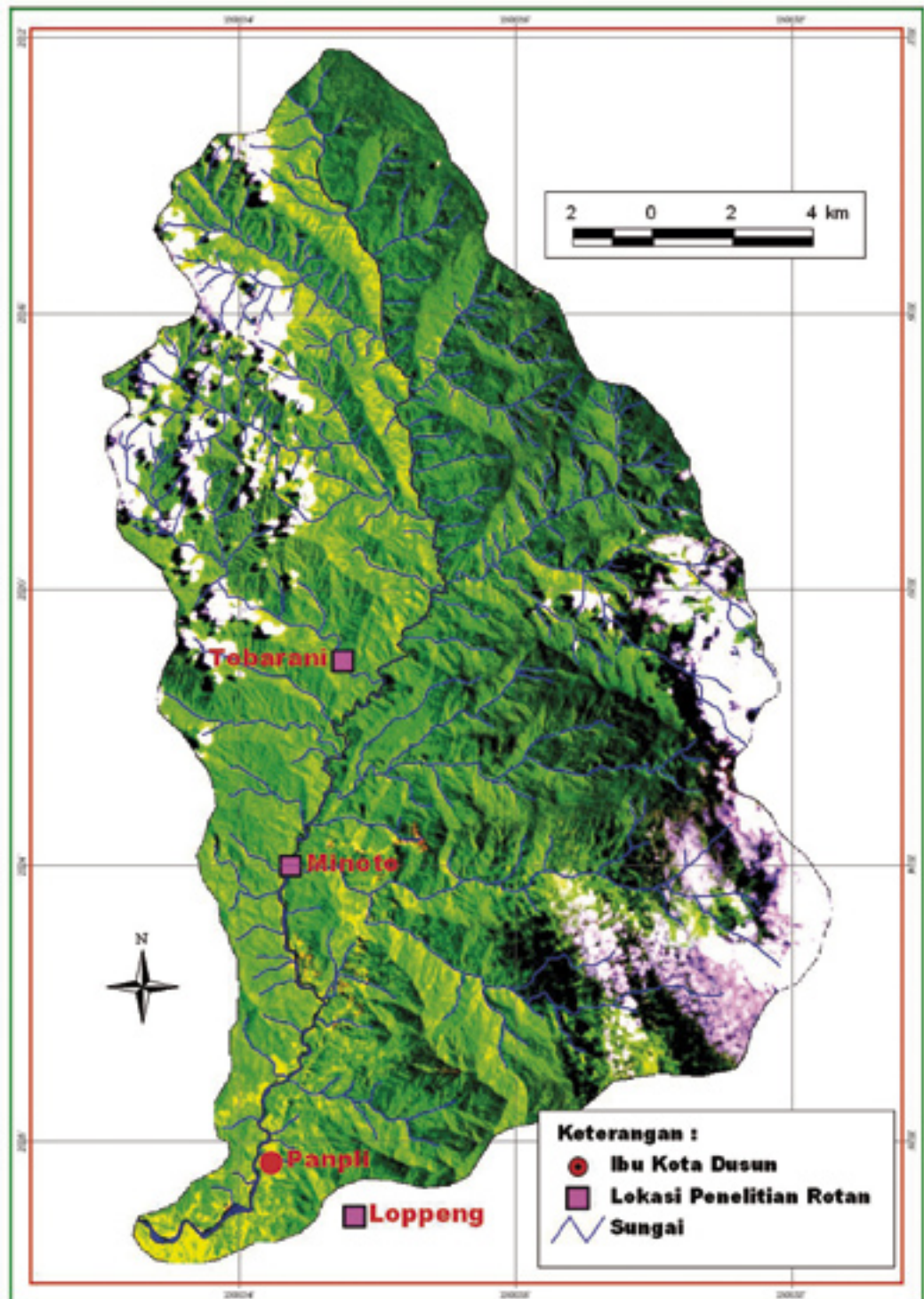
tempat kerja (sawah atau kebun), lokasi Dusun Pampli cukup strategis karena jarak sawah atau kebun dari rumah mereka hanya ratusan meter saja. Namun demikian, masyarakat hanya tinggal di Dusun Pampli selama musim tanam dan musim panen padi saja. Selebihnya mereka diperintah oleh kepala desa untuk kembali bermukim di pusat desa. Kebijakan kepala desa tersebut membuat masyarakat harus berjalan kaki setiap hari dari pusat desa ke Dusun Pampli untuk bekerja di sawah atau di kebun.

Dari 17 orang laki-laki angkatan kerja, yang berumur antara 20 sampai 54 tahun, yang ditemui sedang beristirahat dari kegiatan memungut rotan dapat diketahui bahwa, 10 orang berpendidikan lulus sekolah dasar (SD), 2 orang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), dan 5 orang sisanya tidak tamat SD. Pada umumnya, anak-anak di Dusun Pampli bersekolah di SD, tetapi banyak yang berhenti sebelum tamat dan bekerja sebagai pemungut rotan. Di Desa Sepakat tidak terdapat SMP. Sekolah lanjutan hanya ada di kota Masamba. Hanya mereka yang mempunyai keluarga di Masamba yang dapat melanjutkan sekolah sampai tingkat SMP, sementara yang lainnya harus berhenti karena biaya transportasi dari Desa Sepakat sampai di Masamba adalah Rp. 30.000 pergi pulang (lebih mahal bila musim hujan).

Kawasan Hutan Tempat Mengambil Hasil Hutan

Kawasan hutan dimana masyarakat Dusun Pampli sehari-harinya mengambil hasil hutan termasuk dalam DAS Patikala (Gambar 2) yang merupakan bagian (sub) DAS Baliase. DAS Patikala yang

¹ Data kependudukan di Desa Sepakat kurang akurat dan sudah beberapa tahun tidak diperbaharui. Di kantor desa juga tidak tersedia data tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat secara rinci.

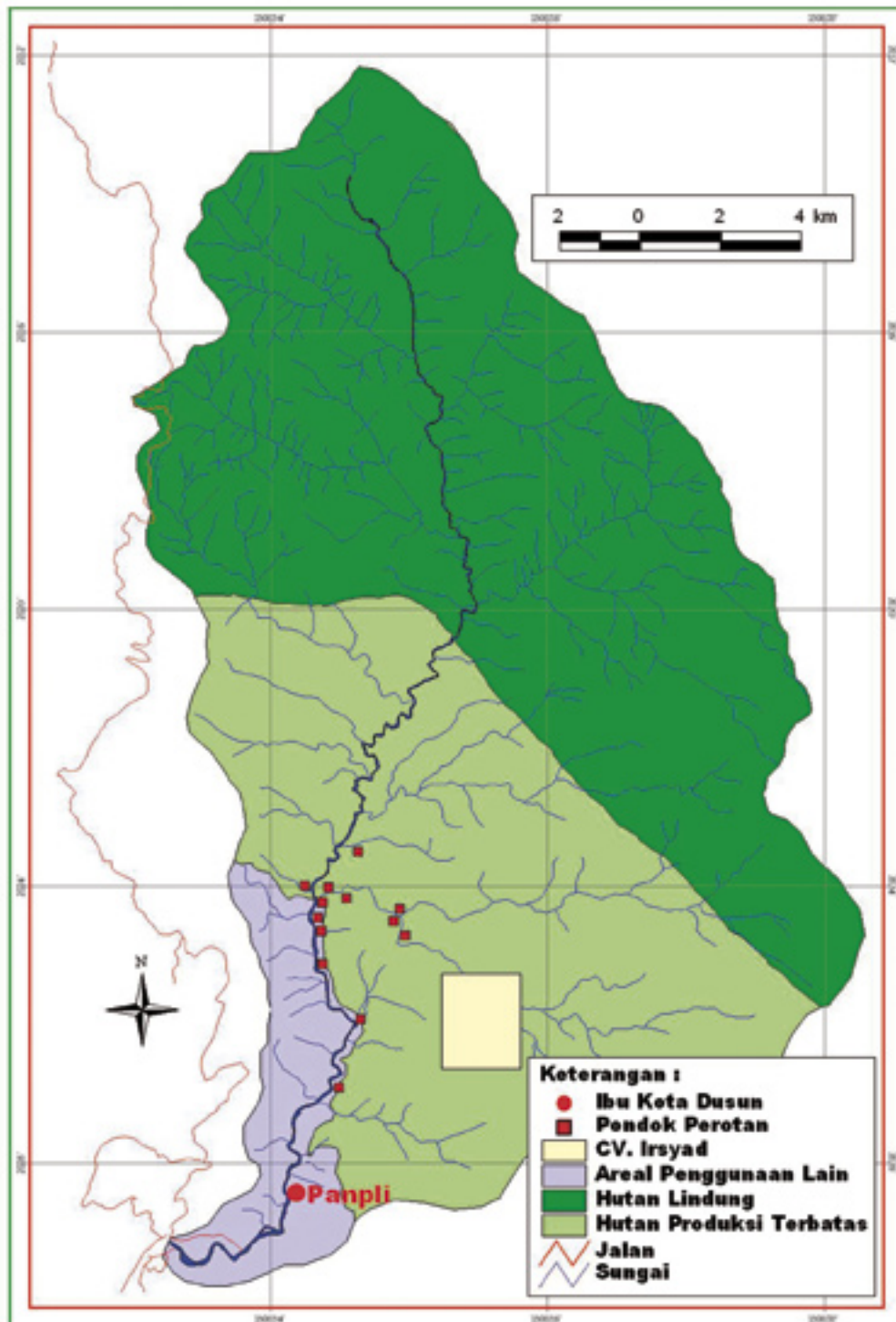


Gambar 2. Peta wilayah DAS Patikala yang merupakan tempat masyarakat Dusun Pampli memungut rotan

luasnya sekitar 33,829 ha terbagi dalam 3 fungsi kawasan hutan: Hutan Lindung (HL) seluas 20,651 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 11,547 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1,631 ha (Gambar 3). Bagian kawasan hutan yang berstatus HP dan APL merupakan bekas areal konsesi (bekas tebangan) HPH PT Panply.

Masyarakat dapat memungut hasil hutan

rotan, damar, gaharu dan madu di seluruh wilayah DAS Patikala, sedangkan untuk mengambil kayu hanya diperbolehkan dalam kawasan yang tergolong APL, sesuai dengan IPK yang dimiliki oleh perusahaan mitra masyarakat. Namun karena alasan aksesibilitas, masyarakat tidak memungut rotan secara merata di seluruh bagian wilayah DAS Patikala. Karena lokasinya



Gambar 3. Status kawasan hutan di dalam DAS Patikala dan sebaran pondok pemungut rotan

terlalu jauh dari kampung, sampai saat ini masyarakat belum sampai memungut rotan ke dalam kawasan hutan lindung.

Ketergantungan Masyarakat terhadap Hasil Hutan

Sumberdaya hayati yang diperoleh masyarakat dari dalam hutan dapat dikelompokkan

menjadi dua kategori sesuai Primack (1993): (a) produktif, yaitu yang diperjual belikan di pasar, dan (b) konsumtif, yaitu yang dikonsumsi sendiri atau tidak dijual. Tabel 1 memperlihatkan beberapa jenis sumberdaya hayati dari hutan yang diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Pampli serta yang berpotensi tetapi belum dimanfaatkan.

Dilihat dari mata pencahariannya, hampir seluruh masyarakat Dusun Pampli bergantung hidupnya dari hasil hutan. Sebagian besar masyarakat bergantung hidup secara langsung melalui pekerjaan memungut rotan dan/ atau mengambil kayu. Namun ada juga yang bergantung secara tidak langsung, antara lain menjadi ketua kelompok yang bertugas mengkoordinir kelompok dan sebagai perantara antara kelompok dengan juragan pembeli rotan, buruh angkut kayu atau menjadi juru masak (wanita yang belum menikah).

Kepala Dusun Pampli menyatakan bahwa 24 dari 37 kepala keluarga penduduk Dusun Pampli memiliki pekerjaan pokok sebagai pemungut rotan atau pengambil kayu. Bertani sebagai pekerjaan sampingan. Sisanya yang 13 kepala keluarga memiliki pekerjaan pokok sebagai petani sawah/kebun dan memungut rotan atau mengambil kayu sebagai pekerjaan sampingan. Namun hanya 12 kepala keluarga yang berhasil diperoleh datanya seperti diperlihatkan pada Tabel 2. Sebagian kepala keluarga tidak dapat diwawancarai karena mereka berada di dalam hutan selama tim peneliti sosial ekonomi berada di Dusun Pampli. Belum ada anggota masyarakat

Dusun Pampli yang menjadi pegawai negeri maupun yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan seperti pertukangan, bengkel, dll.

Kepala keluarga yang pekerjaan pokoknya bertani sawah tanpa bekerja sampingan memungut hasil hutan, biasanya orang yang karena umur dan/atau kesehatannya tidak memungkinkan lagi pergi mengambil hasil hutan. Baik pekerjaan memungut rotan maupun menebang kayu merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan banyak tenaga dan penuh resiko kecelakaan (seringkali terjadi pemungut rotan yang jatuh dari pohon atau tenggelam saat menghanyutkan hasil hutan), sehingga tidak setiap orang dapat melakukannya.

Enam belas dari 17 kepala keluarga di Dusun Pampli yang memiliki barang-barang seperti radio *tape recorder*, TV, Video/VCD player, sepeda, bahkan ada satu orang yang memiliki sepeda motor menyatakan bahwa mereka memperoleh uang untuk membeli barang-barang tersebut dari mengambil hasil hutan (70 % dari rotan dan 30 % dari kayu). Satu orang yang hanya memiliki radio *tape recorder* menyatakan bahwa barang tersebut dibelinya dari hasil menjual biji kakao

Tabel 1. Sumberdaya hayati yang ada di dalam hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Pampli

No.	Jenis Sumberdaya Hayati	Kategori	Keterangan
1.	Rotan	Produktif	Diambil, tidak bermusim
2.	Kayu	Produktif	Diambil, tidak bermusim
3.	Madu	Produktif	Diambil, bermusim
4.	Gaharu	Produktif	Diambil, langka
5.	Damar	Produktif	Belum diambil, tidak bermusim
6.	Tanaman hias	Produktif	Belum diambil, tidak bermusim
7.	Sayuran dan tanaman obat	Konsumtif	Diambil, tidak bermusim
8.	Udang/Ikan	Konsumtif	Diambil, tidak bermusim
9.	Kayu bakar	Konsumtif	Diambil, tidak bermusim
10.	Anoa/Rusa (daging)	Konsumtif	Binatang dilindungi

Catatan: Dalam 2 atau 3 hari sekali, ada 3 orang yang datang berburu (memasang jerat) babi tetapi bukan orang dari Dusun Pampli

Tabel 2. Jenis pekerjaan dari 12 kepala keluarga yang diamati

Pekerjaan Pokok	Pekerjaan Sampingan	Jumlah KK
Memungut rotan	Tidak ada	6
Memungut rotan	Bertani sawah dan kebun	1
Bertani sawah/kebun	Memungut rotan	2
Bertani sawah/kebun	Tidak ada	1
Mengambil kayu	Tidak ada	1
Mengambil kayu	Bertani sawah dan kebun	1
Jumlah		12

Keterangan: KK = Kepala Keluarga

yang diambilnya dari kebun. Umumnya uang *cash* yang dibutuhkan oleh masyarakat Dusun Pampli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diperoleh dari memungut rotan atau mengambil kayu.

Anggota keluarga yang bekerja memungut rotan dapat berjumlah lebih dari satu orang, yaitu bapak beserta anak (tergantung umur). Pengamatan yang dilakukan selama sekitar 1 bulan (17 September sampai dengan 19 Oktober 2005) terhadap kelompok yang keluar dan masuk hutan melewati Dusun Pampli menunjukkan bahwa rentangan umur para pemungut rotan berkisar antara 12 sampai 49 tahun. Anak kecil dan orang lanjut usia yang menjadi tanggungan kepala keluarga dihidupi dari pekerjaan mengambil hasil hutan, terutama rotan.

Sumber Pendapatan Lain dan Karakteristik Sosial Masyarakat

Sawah, Kebun dan Lahan Pekarangan

Di sekitar Dusun Pampli terdapat hamparan sawah, tetapi nampak tidak terawat dengan baik seperti umumnya sawah yang ada di Jawa atau Bali. Duabelas responden yang diwawancarai semuanya menyatakan bahwa mereka hanya turun ke sawah saat menyiapkan lahan sampai menanam bibit, kemudian kembali lagi pada saat padi siap panen. Waktu di antara musim tanam dan musim panen digunakan untuk memungut hasil hutan, terutama rotan. Jika sesekali menengok sawahnya, mereka hanya melihat air dan tidak pernah melakukan kegiatan merumput atau memupuk. Padi yang dihasilkan dari sawah hanya mencukupi untuk dikonsumsi sendiri.

Lahan-lahan kering yang ada di pinggir kampung hanya ditumbuhi oleh semak belukar atau pohon-pohon besar yang beberapa diantaranya adalah pohon durian yang sudah tua. Di pinggir hutan terdapat banyak kebun kakao yang tidak terawat dengan baik. Di beberapa lokasi bahkan nampak tanaman kakao yang tumbuh seperti tumbuhan liar (tumbuh secara alami). Menurut masyarakat Dusun Pampli, itulah kebun mereka. Sama halnya dengan di sawah, semua masyarakat yang diwawancarai mengakui bahwa mereka umumnya datang ke kebun pada saat menanam dan panen.

Saat musim buah lebat, satu pohon durian dewasa dapat menghasilkan buah seharga Rp. 500.000. Namun demikian, pohon durian yang ada sekarang sebagian besar warisan dari nenek. Kalau pun ada pohon durian muda jumlahnya sangat jarang dan cenderung tumbuh dari anakan alami. Ironisnya, saat membutuhkan uang, masyarakat sering menjual pohon durian mereka untuk ditebang dan diambil kayunya dengan harga Rp. 300.000 per pohon.

Karena tidak terbiasa, mungkin tidak mudah bagi masyarakat Dusun Pampli untuk berkebun kakao dan bertani padi. Namun, menanam bibit durian satu demi satu di kebun atau tanah ongko seharusnya bukanlah sesuatu hal yang sulit dan tidak terlalu membutuhkan waktu. Durian adalah tanaman hutan yang sekalipun tidak dipelihara dapat tumbuh sendiri, hanya saja kuantitas dan kualitas buahnya tidak sebaik pohon yang dipelihara. Sepuluh kepala keluarga berumur di atas 30 tahun yang diwawancarai menyatakan bahwa pohon durian yang dimilikinya bervariasi antara 5 pohon sampai 30 pohon (Tabel 3). Lima sampai 30 pohon durian dalam 2 ha kebun bukanlah jumlah yang banyak.

Tabel 3. Kepemilikan lahan kebun dan jenis tanaman yang ada di dalamnya

No.	Nama Responden	Luas Kebun (ha)	Jumlah Tanaman (batang)		
			Durian	Cempedak	Kakao
1.	Marasan	2,00	5	0	Ada*
2.	Sego	2,50	25	0	Ada*
3.	Abdul Wahid	2,00	20	0	300 batang
4.	Karim	0,25	0	0	Ada*
5.	Syarifuddin	2,00	30	0	Ada*
6.	Ribu	0,50	10	0	Ada*
7.	Amme Rama	2,00	15	0	Ada*
8.	Rusuddin	0,75	10	0	Ada*
9.	Sidik	1,50	20	0	Ada*
10.	Ambe Feri	1,00	10	0	Ada*

Keterangan: * = tidak diketahui jumlahnya

Karena tidak dirawat dengan baik, umumnya tanaman kakao masyarakat Dusun Pampli tidak berbuah dengan baik, walau umurnya sudah dewasa. Menurut Kepala Dusun Pampli, belum ada di antara warganya yang menghasilkan lebih dari 15 kg biji kakao dalam satu kali musim panen. Memang di sekitar Dusun Pampli terdapat dua kebun kakao yang sudah berproduksi dengan baik dengan hasil bernilai jutaan rupiah setiap kali panen. Namun kebun tersebut milik orang yang tinggal di Masamba.

Masa Depan yang Tidak Dipersiapkan

Kekayaan sumberdaya hayati hutan yang melimpah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sepakat kapan pun mereka perlukan. Ada kecenderungan bahwa lingkungan alam seperti ini menumbuhkan pola berpikir *quick cash* di kalangan masyarakat Desa Sepakat. Dari pada mengurus kebun kakao yang entah kapan dapat dinikmati hasilnya, lebih baik pergi memungut rotan yang kalau bekerja keras dapat menghasilkan lebih dari satu juta rupiah dalam waktu kurang dari satu bulan. Mungkin hal ini yang membuat masyarakat Desa Sepakat tidak tekun bekerja mengolah kebun dan sawah mereka.

Mudahnya memperoleh uang kontan secara cepat dari memungut hasil hutan juga cenderung menumbuhkan pola hidup boros dan tidak memiliki kebiasaan menabung. Dari 12 responden kepala keluarga yang diwawancarai, hanya tiga orang yang menyatakan memiliki kebiasaan menabung, sedangkan sembilan orang lainnya tidak dengan alasan uang tidak cukup untuk makan. Padahal dilihat dari kepemilikan barang berharga/hiburan, tujuh orang diantara mereka memiliki TV berikut antena parabola (Tabel 4), walau sebenarnya listrik desa tidak secara teratur menyala.

Hasil pengamatan terhadap para pemungut rotan di hutan menunjukkan bahwa, para

pemungut rotan meninggalkan pondok untuk memungut rotan sekitar pukul tujuh pagi. Umumnya, sebelum siang mereka sudah berhasil mengumpulkan rotan sejumlah yang mereka mampu tarik sampai di pondok. Dengan demikian, para pemungut rotan sudah akan pulang ke pondok pada siang hari. Rotan yang dikumpulkan dari hutan dipotong-potong menjadi ukuran panjang tertentu untuk dapat dengan mudah dihanyutkan ke kampung. Hanya sebagian kecil dari para pemungut rotan yang menggunakan waktu sore mereka untuk memotong-motong rotan. Sebagian besar perotan menggunakan waktu sore mereka untuk bersantai dan memilih untuk mengambil waktu sekitar tiga sampai empat hari di akhir keberadaan mereka di hutan hanya untuk memotong dan mengikat rotan hasil kerja mereka.

Para anak muda yang bekerja memungut rotan melewatkan malam hari mereka di dalam hutan dengan bermain kartu (judi). Walau uang taruhannya tidak banyak, selama bermain mereka menghabiskan banyak rokok. Dengan begadang, stamina mereka menjadi lemah. Tidak mengherankan jika pada setiap pondok kami menemukan sekurang-kurangnya satu orang yang sedang sakit malaria.

Hasil wawancara dengan seorang kaki tangan pengusaha pemegang ijin pemungutan rotan yang bernama Ibrahim (Oktober, 2005) menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan sebagian pemungut rotan dari Desa Sepakat pergi ke hutan hanya untuk menikmati pinjaman uang panjar yang diberikan oleh pengusaha. Untuk berangkat memungut rotan, pengusaha memberikan pinjaman uang panjar untuk membeli kebutuhan pokok selama memungut rotan. Apabila bahan kebutuhan habis, mereka turun ke kampung untuk menambah pinjaman. Mereka, terutama yang muda, juga akan turun ke kampung apa bila di kampung ada pesta pernikahan dan meminjam uang lagi saat kembali ke hutan. Tidak jarang

Tabel 4. Kepemilikan barang berharga/hiburan di antara 12 orang responden kepala keluarga

No.	Jenis Barang	Jumlah (Orang)
1.	Radio tape recorder	1
2.	TV berikut antena parabola	4
3.	Radio tape reorder, TV berikut antena parabola	1
4.	Radio tape reorder, TV berikut antena parabola, sepeda motor	1
5.	Radio tape reorder, TV berikut antena parabola, VCD player	1
6.	Tidak punya salah satu barang di atas	4
Jumlah		12

terjadi bahwa uang panjar yang mereka pinjam nilainya jauh lebih besar dari nilai rotan yang mereka kumpulkan. Tabel 5 memperlihatkan hasil rotan satu kelompok yang anggotanya sebagian besar anak muda dari Desa Sepakat selama 48 hari di hutan. Sebagai pembandingan, Tabel 6 memperlihatkan hasil kerja satu kelompok dari Desa Lantantallang (tetangga Desa Sepakat) selama 16 hari di hutan yang sama.

Walaupun hasilnya cukup besar, memungut rotan dan mengambil kayu bukanlah pekerjaan yang ringan. Kemanjaan yang diberikan oleh alam saat masih bertenaga (muda) membuat masyarakat tidak sadar bahwa ada saat dimana mereka tidak mampu lagi menikmati sumberdaya hayati hutan yang melimpah. Ketidaksadaran inilah yang menjadi penyebab mengapa masyarakat Desa Sepakat tidak rajin mengurus kebun dan tidak memiliki kebiasaan menabung. Mereka baru sadar saat sudah tua dan tidak bertenaga lagi. Akhirnya menjadilah

mereka orang tua yang miskin yang bergantung hidup dari orang lain. Seandainya saja pemungut rotan menggunakan waktunya di hutan secara lebih produktif, sangat mungkin mereka dapat menghasilkan rotan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, mereka memiliki waktu yang cukup untuk tinggal di kampung merawat sawah dan menanam tanaman jangka panjang di kebun yang hasilnya dapat dijadikan tumpuan hidup di hari tua.

Sistem Kekeluargaan yang Menghambat

Umumnya di daerah Sulawesi Selatan, hubungan kekeluargaan dapat terjadi melalui perkawinan. Perkawinan antara si A dengan si B menjadikan seluruh sanak famili keluarga si A memiliki hubungan kekeluargaan dengan sanak famili si B, sekalipun diantara kedua sanak famili tersebut tidak ada hubungan darah sama sekali. Karena itu, sering kali masyarakat satu dusun berada dalam satu sistem kekeluargaan. Kepedulian

Tabel 5. Hasil kerja satu kelompok pemungut rotan dari Desa Sepakat selama 48 hari di hutan (1 September sampai 17 Oktober 2005)

No.	Nama Anggota Kelompok	Umur (Tahun)	Status Kawin	Hasil* (Rp.)
1.	Anggota 1	16	Belum	379.450
2.	Anggota 2	27	Sudah	1.052.250
3.	Anggota 3	16	Belum	333.500
4.	Anggota 4	14	Belum	252.900
5.	Anggota 5	32	Sudah	844.400
Nilai Rotan yang diberikan kepada stoker sebagai gaji				502.500
Jumlah				2.862.500/5 orang/48 hari

Keterangan: * = harga digabung dari berbagai jenis dan kualitas; stoker adalah perempuan juru masak kelompok

Tabel 6. Hasil kerja satu kelompok pemungut rotan dari Desa Lantantallang selama 16 hari di hutan (9 sampai 24 September 2005)

No.	Nama Anggota kelompok	Umur (Tahun)	Status Kawin	Hasil* (Rp.)
1.	Anggota 1	20	Belum	794.400
2.	Anggota 2	17	Belum	517.050
3.	Anggota 3	28	Kawin	866.800
4.	Anggota 4	23	Belum	1.003.900
5.	Anggota 5	40	Kawin	862.800
6.	Anggota 6	17	Belum	339.900
7.	Anggota 7	36	Kawin	1.015.750
8.	Anggota 8	20	Kawin	465.350
9.	Anggota 9	25	Kawin	336.900
10.	Anggota 10	Tidak diketahui	Tidak diketahui	900.450
11.	Anggota 11	Tidak diketahui	Tidak diketahui	861.900
Jumlah				7.965.200/11 orang/15 hari

Keterangan * = harga digabung dari berbagai jenis dan kualitas; gaji stoker dibayar dalam bentuk uang, bukan rotan

sosial di antara orang-orang yang terhimpun dalam sistem kekeluargaan di daerah pedesaan Sulawesi Selatan umumnya cukup kuat. Sistem kekeluargaan seperti itu juga nampak sangat kuat di Desa Sepakat.

Mengapa masyarakat Desa Sepakat tidak memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan lahan kering yang ada di sekitar kampung mereka untuk menanam pisang, singkong, atau jagung? Jawabannya adalah karena banyak ternak kerbau yang berkeliaran memakan tanaman mereka. Sebetulnya di Desa Sepakat ada aturan yang menyatakan bahwa, kerbau yang merusak tanaman orang di kebun dapat ditebas (dilukai) dengan parang untuk membuat pemiliknya jera. Namun aturan itu tidak berjalan karena adanya hubungan kekeluargaan sebagai kendala. Akhirnya orang yang memiliki tanamanlah yang harus memagari kebun dan sawah mereka.

Dalam suatu masyarakat, selalu ada orang rajin dan orang malas. Pada umumnya orang yang rajin akan berhasil dan hidupnya sejahtera, sebaliknya orang malas cenderung menjadi miskin. Sistem kekeluargaan yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi membuat orang yang rajin tidak dapat menjadi sejahtera karena harus turut menghidupi orang yang malas. Akhirnya semuanya menjadi apatis dan malas. Fenomena seperti ini nampak menjadi salah satu latar belakang kehidupan sosial masyarakat di Desa Sepakat.

Rumah yang ditempati oleh tim peneliti adalah milik orang Jawa yang beristerikan wanita dari Desa Sepakat. Sebagai orang yang berlatar belakang sosial budaya Jawa dan dengan modal yang telah dikumpulkannya, orang Jawa tersebut membeli sawah, kebun dan mengusahakan mesin gilingan padi. Dia juga memelihara sekitar 25 ekor itik yang rata-rata dalam sehari bertelur antara 15 - 20 butir. Ketika ditanya "berapa hari sekali pergi menjual telur bebek ke Masamba?", dia menjawab "tidak pernah, karena telur bebeknya hanya dibagi-bagi dengan sanak famili". Memang benar, sehari setelah itu datang seorang tua yang meminta telur dan diberinya 10 biji. Beberapa saat setelah itu, datang lagi seorang meminta dedak dengan membawa karung plastik. Dedak yang dihasilkan dari mesin penggilingan padi biasanya dibeli oleh orang dari Masamba yang beternak ayam. Sistem kekeluargaan seperti ini juga nampak di dalam kelompok pemungut rotan dan pengambil kayu. Tanpa membedakan frekuensi makan dan minum

serta kapasitas perut seseorang, masing-masing anggota kelompok dikenakan biaya logistik yang sama.

Sistem kerja yang berlaku pada kelompok pemungut rotan sedikit lebih baik dibanding kelompok pengambil kayu. Hasil rotan anggota kelompok tidak digabung. Siapa yang kuat dia mendapat lebih banyak. Walau demikian, saat menghanyutkan rotan ke kampung, semua hasil rotan menjadi tanggungjawab bersama. Berbeda dengan kelompok pemungut rotan, hasil kerja anggota pengambil kayu tidak dipisah-pisah di antara anggota kelompok, mungkin karena kayu yang ditebang hanya satu dan dikerjakan bersama-sama. Dengan sistem seperti ini, anggota kelompok yang lemah dan malas ikut menikmati hasil kerja keras anggota yang rajin dan kuat. Seorang pemungut rotan yang juga pernah bekerja sebagai pengambil kayu yang bernama Riki (Pers. Com., Oktober 2005) menyatakan bahwa, kadang-kadang ada anggota kelompok pengambil kayu yang selalu mengaku sakit dan beristirahat, namun kepadanya harus diberi bagian yang sama.

Potensi dan Kontribusi Sumberdaya Hayati Hutan pada Masyarakat

Hasil Hutan Kayu

Di dalam 61 sampel plot pengamatan (6,1 ha) yang disebar pada 3 lokasi, hanya ditemukan beberapa pohon dari jenis kayu perdagangan dengan potensi yang sangat rendah. Jenis-jenis kayu perdagangan yang ditemukan adalah *Palaquium* sp. (Nyatoh, Nato), *Calophyllum* sp. (Bintangur), *Santiria laevigata* (Tapi-tapi), *Parinari corymbosa* (Kolaka), *Anisoptera* sp. (Mersawa), *Disoxylum* sp. (Kondongio), *Elmerillia* sp. (Uru), *Litsea firma* (Ponto) dengan potensi yang sangat rendah (Tabel 7). Kecuali *Palaquium* sp. yang ditemukan di ketiga lokasi penelitian, jenis-jenis penting lainnya hanya ditemukan pada dua atau satu lokasi saja.

Dua tokoh masyarakat Desa Sepakat yang diwawancarai secara terpisah (Oktober 2005) menyatakan bahwa, ketika masih beroperasi, HPH PT Panply melakukan penebangan pohon secara membabi buta. Masyarakat mengetahui adanya aturan bahwa, dalam radius 100 m dari pinggir sungai tidak boleh dilakukan penebangan pohon. Namun pada kenyataannya, operator *chainsaw* dan *bulldozer* PT Panply mencari dan

Tabel 7. Potensi kayu per 2 ha dari semua jenis pohon berdiameter lebih dari 30 cm yang ada pada tiga lokasi persebaran plot (Loppeng, Minoto, dan Tobarani)

No.	Species	Famili	Volume m ³ (Jumlah Individu)/2 ha		
			Loppeng	Minoto	Tobarani
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Artocarpus</i> sp.	Moraceae	2,56 (03)	11,54 (05)	5,25 (01)
2.	<i>Dracontomelon dao</i>	Anacardiaceae	2,34 (04)	3,51 (01)	7,92 (03)
3.	<i>Knema</i> sp.	Myristicaceae	1,33 (02)	18,07 (14)	0,78 (01)
4.	Kodolan		7,24 (07)	18,21 (20)	36,62 (20)
5.	<i>Litsea</i> sp.	Lauraceae	0,81 (01)	8,96 (08)	6,86 (08)
6.	<i>Palaquium</i> sp.	Sapotaceae	8,09 (07)	30,74 (11)	135,27 (32)
7.	Pamuttu		5,48 (05)	5,37 (03)	7,40 (06)
8.	<i>Pimelodendron amboinicum</i>	Euphorbiaceae	1,93 (03)	29,53 (07)	15,42 (06)
9.	<i>Pometia pinnata</i>	Sapindaceae	18,23 (11)	16,79 (11)	7,65 (09)
10.	Buluang		4,08 (05)	7,18 (04)	
11.	<i>Calophyllum</i> sp.	Cluciaceae	0,45 (01)	1,98 (03)	
12.	<i>Dillenia</i> sp.	Dilleniaceae	8,07 (13)	7,50 (07)	
13.	<i>Lithocarpus</i> sp.	Fagaceae	0,30 (01)	1,02 (01)	
14.	<i>Macaranga</i> sp.	Euphorbiaceae	0,64 (01)	0,27 (01)	
15.	<i>Pterospermum</i> sp.	Sterculiaceae	3,49 (01)	0,79 (01)	
16.	<i>Terminalia</i> sp.	Combretaceae	2,82 (01)	1,24 (01)	
17.	<i>Santiria laevigata</i>	Burceraceae		1,78 (01)	26,15 (06)
18.	<i>Aglaiia</i> sp.	Meliaceae		0,75 (01)	3,57 (03)
19.	Balajan			7,60 (02)	1,40 (01)
20.	Bilammeng			0,45 (01)	0,32 (01)
21.	<i>Diospyros buxifolia</i>	Ebenaceae		0,35 (01)	3,07 (04)
22.	<i>Ficus</i> sp1.			19,99 (02)	51,79 (01)
23.	<i>Nephelium</i> sp.	Sapindaceae		8,33 (02)	11,21 (02)
24.	<i>Pangium edule</i> (Kaloa)	Flacourteaceae		8,98 (06)	20,37 (05)
25.	<i>Parinari corymbosa</i> (Kolaka)			0,94 (01)	5,69 (03)
26.	<i>Alseodaphne</i> sp. (Bontoalo)	Lauraceae			1,55 (01)
27.	Bukasu				0,53 (01)
28.	<i>Disoxylum</i> sp. (Kondongio)	Meliaceae			30,05 (03)
29.	<i>Elmerillia</i> sp. (Uru)	Magnoliaceae			34,91 (05)
30.	<i>Ficus</i> sp2.	Moraceae			47,30 (03)
31.	<i>Horsfieldia</i> sp.	Myristicaceae			2,01 (01)
32.	<i>Durio zibetinus</i>	Bombacaceae			2,13 (02)
33.	Landong				28,36 (25)
34.	<i>Xylopia</i> sp. (Lebani)	Annonaceae			1,75 (01)
35.	<i>Litsea firma</i> (Ponto)	Lauraceae			8,95 (04)
36.	Malapao				18,88 (02)
37.	<i>Garcinia</i> sp. (Mappa)	Cluciaceae			3,18 (01)
38.	Peringan				0,74 (01)
39.	Tidak diketahui namanya	Lauraceae			0,55 (01)
40.	<i>Anisoptera</i> sp. (Mersawa)	Dipterocarpaceae		4,68 (01)	
41.	<i>Alstonia</i> sp. (Tiron)	Apocynaceae		31,77 (03)	
42.	Tidak diketahui namanya	Meliaceae		3,41 (06)	
43.	Kaluku-luku		1,12 (01)		
44.	<i>Koordersioden. celebicum</i>	Anacardiaceae	2,23 (01)		
45.	Tauan		2,02 (03)		
46.	Tidak diketahui namanya	Euphorbiaceae	0,59 (01)		
47.	Tidak diketahui namanya	Annonaceae	0,39 (01)		
48.	<i>Actinodaphne</i> sp. (bakan)	Lauraceae	0,89 (02)		2,57 (02)
49.	<i>Elaeocarpus</i> sp. (Pongo)	Elaeocarpaceae	2,71 (03)		1,14 (01)
50.	Katedo		2,58 (01)		14,00 (06)
51.	<i>Neolitsea</i> sp. (Sinangkala)	Lauraceae	3,08 (02)		5,78 (02)
Jumlah			83,47 (81)	251,73(125)	451,11(173)

menebang pohon sampai ke tepi sungai, bahkan ke dalam sungai (pohon *Eucalyptus* banyak tumbuh sampai ke tengah sungai). Mereka juga tidak hanya menebang pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi, melainkan hampir semua pohon yang berdiameter besar, karena kayunya digunakan sebagai *veneer* untuk bahan *core* kayu lapis.

Potensi kayu dari seluruh jenis pohon komersil dan tidak komersil yang berdiameter lebih dari 30 cm cenderung menurun pada kawasan hutan yang semakin dekat dengan kampung. Hal ini selain diakibatkan oleh kegiatan PT Panply, juga disebabkan oleh penebangan masyarakat. Hutan yang berada dekat dengan kampung merupakan Areal Penggunaan Lain, dimana masyarakat agak lebih mudah melakukan penebangan. Adapun kawasan hutan yang ada di wilayah Minoto merupakan Hutan Produksi, sedangkan hutan yang ada di wilayah Tobarani merupakan perbatasan antara Hutan Produksi dengan Hutan Lindung.

Pada saat penelitian ini berlangsung, PT Maharani - sebagai pemegang ijin IPK yang menjadi mitra masyarakat pengambil kayu - sedang mengalami masalah perijinan dengan Dinas Kehutanan, sehingga *sawmill*-nya disegel. Kejadian tersebut membuat tim peneliti kesulitan memperoleh informasi yang jujur dari para pengambil kayu mengenai banyaknya kayu yang mereka hasilkan saat keluar dari hutan. Namun dari hasil pengamatan terhadap beberapa kelompok yang sedang menebang kayu di hutan dapat diketahui bahwa satu kelompok yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan satu orang perempuan juru masak rata-rata dapat menghasilkan 1 m³ kayu balak setiap hari. Tabel 8 dibuat dari hasil wawancara dengan 5 kelompok pengambil kayu yang pengakuannya masuk akal dan dapat dipercaya.

Dari pengamatan terhadap kayu yang masuk ke kampung dapat diketahui bahwa banyaknya kayu yang dikeluarkan dari hutan selama 1 bulan (tanggal 21 September sampai 20 Oktober

Tabel 8. Gambaran hasil kerja kelompok penebang kayu yang dirangkum dari hasil wawancara dengan 5 kelompok

Ketua Kelompok (Anggota L/ P)	Lama Perjalanan (hari)	Lama di Hutan (hari)	Kebutuhan		Hasil (m ³)			Harga Total Kayu (Rp.)
			Bensin (lt)	Oli (lt)	Kayu Uru	Kayu Warna Merah	Kayu Warna Putih	
Usman (6/1)	2	18	54	10	*6,0	1,2	1,5	5.100.000
Anonim (3/0)	1	3	15	5			*2,0	800.000
Anonim (3/0)	1	5	20	5		4		1.400.000
Syamsuddin (8/2)	2	5	40	10		4,0	6,0	3.200.000
Mantan Kades (8/2)	2	5	15	5			12,5	4.000.000

Keterangan : L = laki-laki, P = perempuan

Catatan: Hasil kayu dalam bentuk balak kecuali yang ditandai dengan * dalam bentuk papan.

Tabel 9. Jumlah dan nilai kayu yang dihasilkan dari hutan selama 1 bulan, antara 21 September – 20 Oktober 2005

Tanggal Keluar Hutan	Hasil Kayu Menurut Golongan (m ³)			Tempat Penjualan
	Kayu Uru	Kayu Warna Merah	Kayu Warna Putih	
21 September 2005	0	0	2,0	PT Maharani
23 September 2005	6,0	1,2	1,5	Di Kampung: Pak Armin
23 September 2005	0	25,0	0	PT Maharani
28 September 2005	0	9,0	0	PT Maharani
01 Oktober 2005	0	3,0	3,0	PT Maharani
01 Oktober 2005	3,1	0	0	PT Maharani
?? Oktober 2005	0	4,0	6,0	PT Maharani
20 Oktober 2005	0	2,0	2,0	PT Maharani
Jumlah (M ³)	9,1	44,2	14,5	
Harga/m ³ (Rp)	700.000	350.000	320.000	Harga Seluruh Kayu
Harga Total	6.370.000	15.575.000	4.640.000	Rp. 26.585.000 / bulan

Tabel 10. Jenis-jenis rotan yang ditemukan di hutan sekitar Dusun Pampli dan harga basah di tingkat masyarakat bulan Oktober 2005

No.	Jenis Rotan		Harga pada Beberapa Pengusaha (Rp./kg)		
	Nama Daerah	Nama Latin	A. Nura	Basri	H. Jamal
1.	Anduru	<i>Calamus ornatus</i>	-	-	-
2.	Batang	<i>Calamus zollingeri</i>			
	Dim < 30 mm		500	800	-
	Dim 30-40 mm		900	800	-
	Dim > 40 mm		425	800	-
3.	Batang Tokoi	<i>Demonorops cf. lamprolepis</i>	425	-	-
4.	Jaramasi	<i>Calamus lejocaulis</i>	-	-	-
5.	Lambang	<i>Calamus ornatus</i>	650	750	750
6.	Manuk	<i>Calamus sp.</i>	450	-	-
7.	Nanga	-	450	-	650
8.	Noko	-	-	550	-
9.	Pahit	<i>Calamus densiflorus</i>	600	-	600
10.	Saloso	-	-	400	-
11.	Sambua	-	-	-	-
12.	Seba	-	450	-	-
13.	Sappin	-	-	-	-
14.	Tohiti	<i>Calamus inops</i>			
	Dim <25 mm		425	600	500
	Dim 25-30 mm		425	600	700
	Dim 30-40 mm		425	600	1.000
15.	Uban	-	650	-	-
16.	Umbul	<i>Calamus cf. symphysipus</i>	-	-	-

Keterangan: Dim = Diameter; Nama Latin diambil dari Dranfield dan Manokaran (1996)

2005) adalah seperti disajikan pada Tabel 9. Sejumlah kayu tersebut merupakan hasil kerja 8 kelompok dengan jumlah anggota keseluruhan 46 orang. Jumlah kayu yang dihasilkan selama penelitian ini berlangsung mungkin lebih kecil dari biasanya, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PT Maharani menghadapi masalah perijinan, sehingga aktivitas pengambilan kayu sempat terganggu.

Hasil Hutan Bukan Kayu: Rotan

Dalam kawasan hutan dimana masyarakat Dusun Pampli pergi memungut rotan ditemukan 15 jenis rotan (Tabel 10). Namun demikian, tidak semua jenis rotan dimanfaatkan. Pemilihan jenis rotan bukan saja didasari pertimbangan nilai ekonomi, tetapi juga kemudahan dalam mengumpulkan. Karena rumit untuk mengumpulkannya, jenis rotan yang ukuran batangnya terlalu kecil seperti rotan jaramasi yang berdiameter sekitar 1-1,5 cm tidak diambil walaupun harganya cukup mahal.

Semua pemungut rotan menyatakan bahwa rotan tidak akan pernah habis sekalipun sudah diambil sejak zaman nenek moyang mereka.

Rotan tumbuh dalam rumpun (kecuali rotan tohiti dan batang tokoi yang tumbuh tunggal) dan setiap rumpun terdiri dari beberapa individu anakan dan individu masak tebang. Namun demikian, hasil inventarisasi dalam 61 sampel plot menunjukkan bahwa potensi rotan (meliputi jumlah rumpun, jumlah individu per rumpun, dan total panjang batang ekonomis) semakin berkurang pada kawasan hutan yang semakin dekat dengan kampung (Tabel 11). Hanya rotan batang yang menunjukkan kecenderungan jumlah rumpun dan jumlah individu yang semakin meningkat pada kawasan hutan yang semakin dekat dengan kampung, tetapi total panjang batang ekonomis menunjukkan kecenderungan sebaliknya.

Hasil kunjungan ke pondok-pondok pemungut rotan di sepanjang Sungai Patikala menunjukkan bahwa batang rotan yang dikumpulkan oleh kelompok yang lokasi memungut rotannya semakin dekat dengan kampung cenderung berwarna putih dan pendek, sedangkan yang dikumpulkan oleh mereka yang memungut rotan di daerah hulu umumnya berwarna hijau (Gambar 4). Bagian batang rotan dapat dibedakan menjadi tiga: (a) bagian yang sudah tidak terbungkus

Tabel 11. Potensi rotan per 2 ha pada 3 lokasi: Loppeng (dekat kampung), Tobarani (terjauh dari kampung), dan Minoto (di antara Loppeng dan Tobarani)

Species	Kelimpahan		Potensi/2 ha pada 3 Lokasi		
			Loppeng	Minoto	Tobarani
Batang	Jml rumpun		145	55	65
	Jml individu	Anakan	388	108	168
		Masak tebang	27	22	55
	Panjang batang ekonomis (m)		295	240	1.859
Jaramasi	Jml rumpun		1	8	7
	Jml individu	Anakan	0	36	57
		Masak tebang	7	85	76
	Panjang batang ekonomis (m)		280	3.760	2.769
Lambang	Jml rumpun		136	186	142
	Jml individu	Anakan	387	586	344
		Masak tebang	54	90	126
	Panjang batang ekonomis (m)		395	1.020	3.054
Nanga	Jml rumpun		25	119	237
	Jml individu	Anakan	20	94	206
		Masak tebang	5	25	32
	Panjang batang ekonomis (m)		75	430	979
Saloso	Jml rumpun		78	194	177
	Jml individu	Anakan	234	631	838
		Masak tebang	59	99	170
	Panjang batang ekonomis (m)		925	1.550	4.593
Sambua	Jml rumpun		2	3	4
	Jml individu	Anakan	3	4	3
		Masak tebang	1	0	4
	Panjang batang ekonomis		25	0	25
Sappin	Jml rumpun		2	22	1
	Jml individu	Anakan	2	38	1
		Dewasa	0	8	0
	Panjang batang ekonomis (m)		0	220	0
Tohiti	Jml rumpun		67	173	76
	Jml individu	Anakan	53	115	47
		Masak tebang	14	58	29
	Panjang batang ekonomis (m)		215	1.180	1.490
Umbul	Jml rumpun		25	85	63
	Jml individu	Anakan	11	57	41
		Masak tebang	14	28	22
	Panjang batang ekonomis (m)		95	370	540

pelepah daun (telanjang) dan biasanya berwarna hijau; (b) bagian yang masih terbungkus pelepah daun, tetapi pelepah daunnya sudah kering dengan batang berwarna kuning; (c) bagian yang masih terbungkus pelepah daun yang masih segar dengan batang berwarna keputihan. Potongan rotan berwarna keputihan yang dikumpulkan oleh masyarakat pada lokasi yang dekat dengan

kampung menunjukkan bahwa rotan tersebut diambil dari batang yang masih muda.

Masyarakat yang memungut rotan di daerah hulu umumnya menebang rotan dari rumpun yang tumbuh berdekatan, sehingga umumnya mereka hanya memotong pada satu lokasi saja untuk beberapa hari. Sebaliknya, masyarakat yang memungut rotan di bagian hutan yang lebih



Gambar 4. Rotan yang dipotong dalam sehari oleh seorang pemungut rotan di daerah Minoto (kiri) dan Loppeng (kanan). Selain muda, rotan yang diambil di Loppeng nampak lebih pendek

dekat dengan kampung menyatakan bahwa tidak setiap rumpun yang mereka temukan memiliki batang ekonomi. Dari hal itu seharusnya mereka dapat mengerti dengan baik bahwa potensi rotan cenderung menurun.

Saat penelitian ini dilangsungkan, lokasi memungut rotan masyarakat terkonsentrasi di daerah Minoto (sekitar Sungai Minoto, cabang Sungai Patikala) dan di sekitar Sungai Patikala, ke bagian hilir dari Sungai Monito (Gambar 3). Selama 5 minggu pengamatan - dimulai tanggal 23 September dan berakhir tanggal 29 Oktober 2005 - terdapat 11 kelompok dengan keseluruhan anggota sebanyak 96 orang yang keluar dari hutan dengan membawa rotan hasil kerja mereka. Kesebelas kelompok tersebut berhasil mengeluarkan rotan dari hutan sebanyak 100.383 kg dari berbagai jenis dan kualitas dengan nilai jual sebesar Rp. 68.804.925 (Tabel 12), belum termasuk nilai pajak PSDH dan retribusi yang dibayar oleh perusahaan pembeli rotan kepada pemerintah.

Beberapa orang mantan pemungut rotan menyatakan bahwa keberadaan HPH PT Panply di masa lalu telah menurunkan potensi rotan yang ada di hutan. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa keberadaan jalan *bulldozer* dan jalan *logging* telah memporakporandakan

lantai hutan tempat tumbuhnya rotan. Namun nampaknya menurunnya potensi rotan secara drastis saat itu bukan secara langsung disebabkan oleh *bulldozer* dan pembangunan jalan *logging*. Terbangunnya jaringan jalan telah mempermudah aksesibilitas pemungut rotan untuk mencapai seluruh bagian hutan yang ada rotannya. Kepala dusun yang menemani tim peneliti masuk hutan menyatakan bahwa saat masih ada perusahaan HPH, hampir tidak ada bagian hutan yang tidak dapat diambil rotannya. Pengangkutannya sampai di kampung pun lebih mudah, karena saat itu dapat dilakukan dengan menggunakan truk.

Sekarang setelah perusahaan HPH tidak lagi beroperasi dan jalan *logging* pun sudah rusak, pemungut rotan harus menarik sendiri rotan hasil tebangannya untuk dikumpulkan di pondok. Hasil rotan dalam sehari (dari pukul tujuh pagi sampai sekitar pukul sebelas) mencapai antara 60-100 kg dalam bentuk batangan (belum dipotong-potong). Mereka tidak mampu menarik rotan batangan seberat itu menyeberangi gunung. Oleh karena itu, lokasi mereka memungut rotan umumnya hanya sampai di puncak-puncak bukit yang masih berada dalam satu lereng menuju pondok mereka. Walaupun ditemukan rumpun rotan yang memiliki batang bernilai ekonomi

Tabel 12. Hasil rotan dari 96 orang pemungut rotan yang tergabung dalam 11 kelompok dalam kurun waktu 5 minggu (23 September – 29 Oktober 2005)

No.	Jenis Rotan / Kualitas	Jumlah (kg)	Harga / kg (Rp.)	Harga Total (Rp)
1.	Pai	224	600	134.400
2.	Batang diameter < 30 mm	7.620	500	3.810.000
3.	Batang diameter 30-40 mm	20.167	900	18.150.300
4.	Batang diameter >40 mm	1.670	425	709.750
5.	Batang campuran	2.938	**800	2.350.400
6.	Nanga	9.292	*650	6.039.800
7.	Lambang	41.628	650	27.058.200
8.	Tohiti diameter < 25 mm	3.060	*500	1.530.000
9.	Tohiti diameter 25-30 mm	4.075	*700	2.852.500
10.	Tohiti diameter 30-40 mm	3.352	*1.000	3.352.000
11.	Tohiti campuran	1.427	425	606.475
12.	Seba	1.258	450	566.100
13.	Umbul	3.146	450	1.415.700
14.	Noko	126	**550	69.300
15.	Saloso	400	**400	160.000
Jumlah		100.383	-	68.804.925

Catatan: Harga dihitung berdasarkan harga beli Ibrahim (paling murah), kecuali yang diberi tanda "*" berarti menurut harga beli Haji Jamal dan "***" menurut harga beli Basri

cukup panjang, pemungut rotan tidak akan memotongnya jika tidak mudah menariknya sampai di pondok. Rumpun rotan yang ditinggal seperti ini dapat menjadi sumber benih bagi regenerasi alami, hanya saja penyebarannya di hutan tidak merata.

Hasil Hutan Bukan Kayu: Kayu bakar sebagai sumber energi utama

Seluruh masyarakat Dusun Pampli, sebagaimana juga umumnya masyarakat Desa Sepakat, menggunakan kayu bakar untuk memasak. Kayu bakar umumnya diambil dari kayu bekas pelampung rotan yang ditumpuk di pinggir sungai. Oleh ibu-ibu, kayu bekas pelampung tersebut dipotong-potong dan dibelah selanjutnya disusun rapi di kolong atau samping rumah mereka. Dilihat dari volumenya, cadangan kayu bakar yang dimiliki oleh setiap rumah tangga tersebut setidaknya cukup untuk memasak selama 1 sampai 2 bulan.

Pengamatan yang dilakukan di kota Makassar menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga sederhana yang beranggotakan tujuh orang (ayah, ibu, 4 orang anak dan 1 orang menantu) menghabiskan sebanyak 11 liter minyak tanah dalam seminggu. Harga minyak tanah pada pedagang eceran adalah Rp. 2.600/liter. Bila diambil rata-rata jumlah anggota keluarganya adalah tujuh orang, maka setiap keluarga di Dusun Pampli memanfaatkan kayu bakar dari hutan sebagai sumber energi yang nilainya Rp.

114.400/bulan. Jumlah rumah tangga yang ada di Dusun Pampli saja adalah 37, sedangkan untuk keseluruhan Desa Sepakat adalah 231.

Hasil Hutan Bukan Kayu: Udang dan ikan di Sungai Patikala

Ikan dan udang yang diambil oleh masyarakat Dusun Pampli di Sungai Patikala dimasukkan sebagai salah satu sumberdaya hayati hutan, karena keberadaan air sungai yang menjadi tempat hidup ikan dan udang tersebut bergantung pada hutan. Keberadaan plankton dan mikroorganisme lainnya yang menjadi pakan ikan dan udang di sungai juga didukung oleh suplai nutrisi yang berasal dari hutan.

Masyarakat memanfaatkan terutama udang yang melimpah di sungai sebagai salah satu sumber protein mereka. Pada saat debit air sungai membesar yang disebabkan oleh turunnya hujan di daerah hulu, ibu-ibu turun ke sungai untuk mengambil udang dengan alat yang mereka sebut "serok" (Gambar 5). Alat yang berbentuk kerucut dengan diameter mulut kerucut sekitar 35 cm dan panjang kerucut sekitar 60 cm tersebut dibuat dari lidi daun sagu atau aren. Sambil memegang serok, ibu-ibu menghanyutkan dirinya dalam posisi duduk menghadap ke arah hilir di dasar sungai berbatu yang aliran airnya deras. Sambil hanyut, ibu-ibu menggerak-gerakkan batu-batu kecil yang dilewatinya menggunakan kaki dan menadah udang-udang yang berloncatan dari bawah batu



Gambar 5. Serok yang digunakan kaum perempuan untuk menangkap udang

menggunakan *serok*. Mereka lakukan hal itu berulang-ulang (berkali-kali ke hulu dan kehilir sepanjang sekitar 50 m) sampai panci yang mereka bawa penuh dengan udang.

Pada tanggal 19 Oktober 2005, terdapat 11 orang kaum perempuan yang me"nyerok" pada bagian Sungai Patikala yang melintas di Dusun Pampli (sekitar 300 m panjangnya). Dalam waktu sekitar 30 menit di pagi hari, setiap orang perempuan tersebut memperoleh berkisar antara 2,5 kg sampai 4 kg udang. Karena udang sungai tidak diperjualbelikan di pasar, tidak mudah untuk menghitung nilai pemanfaatan konsumtif (*consumptive use value*) setara nilai uang.

Kaum laki-laki juga mengambil udang dari sungai, tetapi mereka tidak menggunakan serok, melainkan aki mobil. Dengan menggunakan arus listrik yang dihasilkan dari aki tersebut, mereka menyetrom air sungai dan mengakibatkan ikan dan udang dalam radius sekitar 4 m² berlompatan. Mereka menangkap udang yang berlompatan

dengan menggunakan *serok* kecil bertangkai yang terbuat dari jala kawat. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua orang yang menggunakan aki bisa memperoleh udang dan ikan satu ember berukuran sepuluh liter hanya dengan menyusuri salah satu sisi sungai sepanjang sekitar 200 m.

Hasil Hutan Bukan Kayu: Sayuran dan obat-obatan

Sebagian besar kebutuhan sayuran masyarakat Dusun Pampli diperoleh dari hutan (Tabel 13). Selama bulan Ramadan, sayuran dari hutan bukan saja untuk konsumsi sendiri melainkan juga untuk dijual, terutama umbut rotan dan umbut sejenis pohon palem yang mereka namakan "banga". Pada bulan Ramadhan Oktober 2005, umbut rotan laku dijual seharga Rp. 5.000 per ikat (terdiri dari 3 - 5 umbut) di pasar Masamba. Hanya saja umbut rotan tersebut umumnya diambil oleh masyarakat dengan memotong/mematikan anakan rotan yang tumbuh di hutan sekitar dusun mereka.

Di Desa Sepakat terdapat satu orang tenaga paramedis, yaitu bidan. Walaupun demikian, masyarakat cenderung menggunakan obat tradisional yang cara pengobatannya telah mereka kuasai/ketahui sebagai langkah pertama. Sebagai contoh, seorang pemungut rotan yang mengalami luka bakar di bagian punggung karena pelita di pondoknya meledak (18 Okt. 2005) diobati dengan menggunakan campuran madu dan tumbukan daun dari beberapa jenis tumbuhan. Ketika tim peneliti kembali ke Dusun Pampli pada akhir Desember 2005, pemungut rotan yang mengalami luka bakar tersebut sudah sembuh tanpa cacat. Namun ketika ditanyakan jenis-jenis tumbuhan yang biasa digunakan

Tabel 13. Beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Pampli sebagai sayuran dan obat-obatan

No.	Jenis Tumbuhan	Pengunaan	Bagian yang Digunakan
1.	Paku	Sayuran	Daun muda
2.	Rotan berbagai jenis	Sayuran	Umbut
3.	Banga (<i>Arecaceae</i>)	Sayuran	Umbut
4.	Tikala (<i>Zingiberaceae</i>)	Sayuran, bumbu, obat luka	Tunas, bunga
5.	<i>Begonia</i> spp.	Sayuran, bumbu	Daun, bunga, buah
6.	Ketepeng (<i>Cassia alata</i>)	Obat sakit kulit	Daun
7.	<i>Blumea balsamifera</i>	Obat lambung, penurun panas	Daun
8.	<i>Melastoma malabatricum</i>	Obat menghentikan pendarahan	Daun
9.	Kareango	Stamina dan penolak bala	Batang
10.	<i>Hyptis capitata</i>	Mengawetkan mayat	Daun

Keterangan: Selain jenis tersebut dalam tabel, masih ada beberapa jenis lainnya yang digunakan oleh masyarakat, namun tidak mudah untuk mengetahuinya dari masyarakat

sebagai bahan obat-obatan, masyarakat terkesan enggan menjelaskan.

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan

Hasil diskusi dengan 17 responden kepala keluarga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Dusun Pampli terhadap sumberdaya hayati hutan adalah cukup baik (Tabel 14). Semua responden menyadari ketergantungan hidupnya dari sumberdaya hayati hutan (topik diskusi no. 1, 2 dan 3). Namun, ketika topik diskusi bergeser pada peluang pemanfaatan sumberdaya hayati hutan, sebagian besar (13 dari 17) responden menginginkan agar pemungutan hasil hutan tidak perlu diatur dengan alasan hasil hutan tidak akan pernah habis. Pendapat responden akhirnya terpecah dalam 3 kategori ketika diajak berdiskusi masalah setuju atau tidak bila HPH PT Panply kembali beroperasi. Dua orang responden tidak setuju (persepsi baik), delapan orang menyerahkan pada pemerintah (persepsi sedang), dan sisanya tujuh orang menyatakan setuju (persepsi tidak baik). Umumnya yang setuju adalah mereka yang memperoleh manfaat langsung pada saat PT Panply masih beroperasi, seperti menjadi karyawan, walaupun mereka tahu bahwa PT Panply telah merusak sumberdaya hayati (kayu, rotan, udang/ikan) yang ada di hutan sekitar kampung mereka dan mencemari

lingkungan (solar dan oli di sungai). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dan sesaat mengalahkan kesadaran sebagian masyarakat Dusun Pampli akan pentingnya menjaga keberlanjutan keberadaan sumberdaya hayati hutan.

Partisipasi Masyarakat terhadap Kelestarian Sumberdaya Hayati Hutan

Apabila banyaknya responden yang menjawab pada setiap kategori dijumlahkan maka terlihat bahwa jumlah jawaban yang menunjukkan partisipasi negatif adalah paling banyak (Tabel 15). Untuk topik diskusi nomor 4, semua responden memberikan jawaban bahwa masyarakat telah berpartisipasi positif. Sebagian besar responden menyatakan akan membiarkan apabila orang dari daerah lain turut mengambil sumberdaya hayati dari hutan di sekitar kampung mereka. Sebagian besar masyarakat juga tidak menganggap perlu untuk membuat aturan dalam pengambilan sumberdaya hayati hutan. Namun, semua responden menyatakan akan menanam di ladang atau kebun mereka apabila pemerintah menyediakan bibit tanaman pohon yang berguna (kayunya memiliki nilai ekonomi seperti uru). Padahal jika mereka benar-benar berniat, banyak anakan uru tersedia di sekitar kampung. Dari hal ini nampak adanya ketidakrelaan mereka berkorban untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati, sekalipun di dalam tanah miliknya sendiri yang bisa mereka nikmati sendiri di suatu saat nanti. Mereka juga

Tabel 14. Persepsi masyarakat Dusun Pampli terhadap sumberdaya hayati hutan tempatnya bergantung hidup

No.	Topik Diskusi	Kategori Persepsi (orang)		
		Baik	Sedang	Tidak baik
1.	Hutan merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat	17	0	0
2.	Keberadaan hutan di sekitar Dusun Pampli sangat penting bagi masyarakat Dusun Pampli	17	0	0
3.	Keberadaan hutan di sekitar Dusun Pampli perlu dijaga kelestariannya	17	0	0
4.	Sumberdaya hayati hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian pemanfaatannya perlu diatur, sebab bila tidak beberapa jenis sumberdaya alam hayati dapat punah dan tidak dapat dihidupkan kembali	4	13	0
5.	Setujukah anda bila HPH PT Panply beroperasi kembali?	2	8	7
Jumlah		57	21	7

Tabel 15. Tingkat partisipasi masyarakat Dusun Pampli terhadap upaya menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati hutan

No.	Topik Diskusi	Kategori Partisipasi (Orang)		
		Aktif	Pasif	Negatif
1.	Tindakan yang akan dilakukan apabila orang dari daerah lain didatangkan untuk mengambil rotan dan sumberdaya hayati lainnya di wilayah hutan Desa Sepakat	3	2	12
2.	Berupaya demi terciptanya aturan dalam pemungutan sumberdaya hayati hutan	0	4	13
3.	Tindakan yang akan dilakukan apabila HPH PT Panply kembali beroperasi	2	8	7
4.	Tindakan yang akan dilakukan apabila Pemerintah menyediakan bibit tanaman pohon yang kayunya berguna dan bernilai ekonomi tinggi seperti uru, kalapi, jati dll.	17	0	0
5.	Apakah biasa menanam pohon dan tanaman perkebunan di dalam lahan yang anda ongko	8	1	3
Jumlah		30	15	35

Catatan: Untuk topik diskusi nomor 5, lima orang responden yang berumur lebih muda menyatakan tidak punya tanah ongko

cenderung tidak mau diatur dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan sumberdaya hayati di hutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata persepsi masyarakat tidak selamanya sejalan dengan partisipasi. Persepsi yang baik tidak menjamin terjadinya partisipasi positif, malah dapat sebaliknya negatif. Banyak faktor, terutama kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi sesaat, mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk berbuat baik. Beginilah gambaran masyarakat Dusun Pampli, khususnya atau masyarakat Desa Sepakat secara umum dalam memanfaatkan sumberdaya hayati hutan. Mungkin sebuah kondisi yang agak jauh dari harapan ketika kita mengusung 'kearifan lokal' sebagai hal yang selalu positif.

Banyak peneliti yang keliru dalam menetapkan parameter untuk menilai adanya kearifan lokal di masyarakat. Mereka sering menetapkan bahwa suatu masyarakat lokal itu arif hanya dari adanya istilah-istilah tertentu dalam bahasa lokal, misalnya ada istilah yang berarti hutan keramat, semak belukar, padang rumput, bekas ladang, pohon, perdu, anakan pohon, musim buah, musim burung kawin, musim mencari madu dan banyak lagi yang lainnya, tanpa menganalisis secara mendalam apa makna dari istilah tersebut. Semua masyarakat yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi memiliki istilah-istilah tertentu untuk menyatakan benda-benda yang ada di lingkungannya. Adanya istilah-istilah yang

berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal mereka bukan jaminan masyarakat tersebut arif dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Hasil penelitian ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan hanya sekedar istilah dalam berbahasa, persepsi yang baik sekalipun tidak menjamin adanya partisipasi positif, dengan kata lain tidak menjamin adanya kearifan lokal.

Penebangan Pohon dan Pemungutan Rotan oleh Masyarakat

Baik dalam penebangan pohon maupun pemungutan rotan tidak nampak ada aturan atau ketentuan informal (desa/adat) yang diberlakukan terkait dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan hasil. Dalam aturan perijinan pemanfaatan kayu (IPK) memang tidak ada ketentuan penanaman. Diameter pohon yang ditebang pun tidak diatur, karena IPK diberikan di atas lahan tanah milik (bukan kawasan hutan) atau di dalam kawasan hutan yang dikonversi menjadi peruntukan lain. Berbeda dengan aturan perijinan IPK, dalam ketentuan perijinan pemungutan rotan, pemegang ijin diwajibkan untuk melakukan pembibitan dan penanaman. Namun kenyataannya di lapangan, baik pengusaha pemegang ijin maupun kelompok pemungut rotan, tidak pernah melakukan penanaman. Jangan di hutan, di kebun dan tanah ongko mereka sekalipun tidak pernah dilakukan penanaman rotan.

Lokasi Penebangan Pohon

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, wilayah DAS Patikala yang menjadi tempat masyarakat Dusun Pampli mengambil hasil hutan terbagi dalam 3 status: APL, HP, HL (Gambar 3). Sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki oleh PT Maharani sebagai mitra masyarakat di Desa Sepakat, mereka hanya diperbolehkan menebang pohon dalam kawasan yang tergolong APL. Namun pada kenyataannya di lapangan, masyarakat juga mengambil kayu yang berada dalam kawasan HP sejauh antara 1-2 km menyusuri sungai ke arah hulu.

Karena tidak dilengkapi dengan alat berat untuk mengangkut kayu, masyarakat hanya dapat menebang pohon-pohon yang berada tidak terlalu jauh dari sungai. Pohon yang telah ditebang dipotong-potong dan dibelah menjadi bentuk balakan berukuran 25 cm x 25 cm x 4 m atau 12 cm x 25 cm x 4 m. Kayu yang telah dalam bentuk balakan diangkut secara manual dengan cara menyeret atau memikul untuk dikumpulkan di pinggir sungai. Setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, mereka hanyutkan sampai ke lokasi *sawmill* PT Maharani yang menjadi penampung hasil kayu mereka.

Selain yang bermitra dengan PT Maharani sebagai pemilik IPK, terdapat beberapa kelompok pengambil kayu yang menjual hasil kayunya di kampung. Kelompok pengambil kayu ini hanya mengambil kayu di sekitar hutan dekat kampung (Loppeng) yang sering tidak ada sungainya. Jenis pohon yang ditebang pun hanya jenis-jenis yang dapat dijadikan bahan bangunan seperti: uru, kondongio, sinangkala, atau nato. Kayu yang dihasilkan bukan dalam bentuk balak, melainkan sudah dibelah dalam bentuk kayu balok atau papan ukuran pasar dengan harga jual yang lebih mahal dibandingkan bila dijual kepada PT Maharani. Karena tidak ada sungai untuk menghanyutkan, kelompok pengambil kayu seperti ini biasanya mengupahkannya kepada buruh angkut untuk mengangkut kayu mereka dari hutan sampai di kampung. Hasil kayunya dijual kepada pedagang yang datang ke kampung untuk membeli kayu.

Lokasi Pemungutan Rotan

Lokasi pemungutan rotan di hutan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ketika pengamatan lapangan dilakukan, lokasinya berada di sekitar pertengahan Sungai Minoto, yaitu salah satu cabang (anak) Sungai

Patikala (Gambar 3). Pada lokasi tersebut terdapat 8 kelompok pemungut rotan dan lokasi tersebut telah mereka datangi sejak dua bulan sebelumnya. Apabila hasil rotan mereka di lokasi tersebut berkurang, mereka akan berpindah mencari lokasi baru di seberang gunung. Ketika ditanya “setelah berapa tahun mereka bisa kembali ke lokasi semula”, dijawab “tidak tentu, tahun depan pun kalau mau datang masih ada rotan yang didapat”.

Setelah menetapkan suatu lokasi memungut rotan melalui survei potensi, maka beberapa kelompok akan mendatangi lokasi tersebut. Beberapa kelompok cenderung bekerja dalam satu lokasi untuk dapat saling bantu di hutan. Rumpun rotan umumnya tumbuh berdekatan satu dengan yang lain. Kecuali rotan tohiti dan rotan batang tokoi yang tumbuh tunggal, rotan jenis lainnya tumbuh dalam rumpun dimana dalam satu rumpun dapat terdiri dari beberapa batang yang panjangnya puluhan meter. Oleh karena itu, apabila lokasi yang mereka tetapkan memiliki populasi rotan yang cukup tua (batang ekonomisnya panjang), dalam sehari setiap pemungut rotan hanya akan memotong antara lima sampai enam batang rotan, karena lebih dari itu mereka tidak akan mampu menariknya. Di daerah Minoto, satu batang rotan dewasa umumnya mencapai panjang lebih dari 40 m, tetapi dari panjang tersebut sekitar 12 m di bagian ujung tidak diambil karena terlalu muda.

Dalam satu lokasi biasanya tumbuh berbagai jenis rotan. Setiap anggota pemungut rotan akan terlebih dahulu berusaha mencari jenis rotan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta sudah tua. Rotan batang adalah rotan yang memiliki nilai ekonomi tertinggi, oleh karena itu rotan inilah yang terlebih dahulu dipilih. Malahan ada anggota kelompok yang cenderung hanya mencari rotan batang saja untuk ditebang. Tidak ada kebiasaan untuk menyisakan satu atau beberapa batang rotan dewasa (masak tebang) sebagai induk yang nantinya akan menghasilkan anakan.

Batang rotan yang telah dipotong bagian pangkalnya sering tidak mudah ditarik karena, duri yang banyak terdapat pada pelepah dan daun membuatnya tersangkut di tajuk pohon. Apabila rotan yang dipotong adalah dari jenis yang bernilai ekonomi tinggi, seperti rotan batang, maka pemungut rotan sering memanjat pohon tempatnya membelit untuk memotong

daun-daun rotan atau sekalian menebang pohon tempatnya rotan membelit. Sebaliknya apabila batang rotan yang tersangkut dipohon adalah dari jenis yang nilai ekonominya rendah, maka bagian rotan yang tersangkutlah yang dipotong. Kebiasaan untuk menebang pohon tempat rotan membelit memang kurang baik, tetapi hal seperti ini tidak sering dilakukan.

Organisasi Kelompok dan Kemitraan dengan Perusahaan

Untuk bisa mengambil hasil hutan perlu ada ijin dari pemerintah. Masyarakat yang secara langsung mengambil hasil hutan tidak memiliki ijin karena untuk mengurus perijinan dibutuhkan badan usaha (PT, CV, atau Koperasi) dan biaya yang tidak sedikit. Dari hal ini muncullah sistem kemitraan antara masyarakat dengan pengusaha yang memiliki modal. Pengusaha bermodal memohon ijin pemungutan hasil hutan, namun operasional pemungutan hasil hutan di lapangan dilakukan oleh masyarakat. Pola kemitraan seperti inilah yang terjadi di Dusun Pampli, sebagaimana umumnya di Kabupaten Luwu Utara.

Organisasi dan Model Kemitraan Kelompok Pengambil Kayu

Kelompok pengambil kayu dapat dibedakan menjadi dua model. Model pertama adalah kelompok yang tidak bermitra dengan perusahaan pemegang ijin, oleh karena itu kelompok ini dapat dikategorikan sebagai *illegal logger*. Kelompok ini umumnya mengoperasikan 1 unit *chainsaw* beranggotakan satu orang operator *chainsaw*, dua orang *helper*, satu orang juru masak dan beberapa orang buruh angkut. Kayu yang dihasilkan dalam bentuk kayu olahan dan dijual kepada orang yang datang membeli ke kampung. Pembagian hasil kerja dibedakan antara *operator*, *helper*, juru masak dan buruh angkut.

Model kedua adalah kelompok yang bermitra dengan PT Maharani, yaitu perusahaan pemegang IPK. Jumlah anggota kelompok model ini berbeda-beda menurut jumlah *chainsaw* yang dimiliki/disewa. Satu unit *chainsaw* membutuhkan sekitar empat orang tenaga kerja. Dengan demikian kelompok yang mengoperasikan satu unit *chainsaw* akan beranggotakan sekitar satu orang ketua, tiga orang anggota dan satu orang perempuan juru masak, sedangkan

kelompok yang mengoperasikan dua *chainsaw* akan beranggotakan sekitar satu orang ketua, tujuh orang anggota, dan satu atau dua orang perempuan juru masak. Kayu yang dihasilkan adalah kayu balak yang nantinya dijual kepada PT Maharani. Semua anggota laki-laki bekerja sama mulai dari memotong, mengangkut kayu balak ke pinggir sungai, dan menghanyutkannya sampai di dekat *sawmill* PT Maharani. Pengangkutan kayu ke *sawmill* selanjutnya menjadi tanggung jawab PT Maharani.

Sebagai perusahaan pemegang IPK, pada mulanya PT Maharani melakukan penebangan sendiri menggunakan alat berat. Namun ternyata potensi kayu yang ada terlalu kecil untuk bisa menutupi biaya operasional alat berat. Pada sisi lain, bila masyarakat yang dilibatkan dalam proses pemungutan kayu, selain biayanya lebih murah, masyarakat juga memperoleh lapangan pekerjaan. Dari hal itu terbentuklah pola kemitraan yang saling menguntungkan antara PT Maharani dengan kelompok pengambil kayu.

Karena hanya PT Maharani yang mendapat IPK untuk kawasan hutan di sekitar Desa Sepakat, mau tak mau masyarakat harus bermitra hanya dengan PT Maharani. Namun demikian, dari masyarakat tidak pernah terdengar keluhan mengenai harga beli yang ditetapkan oleh PT Maharani. Dibandingkan dengan harga jual eceran kayu olahan kelas I/II di Masamba yang adalah Rp. 900.000/m³, harga beli yang ditetapkan oleh PT Maharani (Rp. 350.000/m³ balak kayu merah dan Rp. 320.000 /m³ balak kayu putih) dapat dikatakan cukup baik mengingat kualitas kayu yang diambil oleh masyarakat Desa Sepakat hanyalah kelas IV ke bawah. PT Maharani juga harus membayar retribusi kabupaten dan provisi sumberdaya hayati hutan (PSDH) kepada pemerintah untuk setiap kayu yang dibelinya dari masyarakat. Untuk kayu uru yang merupakan kayu kelas II, PT Maharani membeli dengan harga Rp. 700.000/m³, sedangkan harga di Masamba adalah Rp. 900.000/m³.

Organisasi dan Model Kemitraan Kelompok Pemungut Rotan

Satu kelompok pemungut rotan dapat terdiri dari lima sampai lebih dari 10 orang anggota. Setiap kelompok diketuai oleh seorang ketua kelompok yang bertugas mengkoordinir kelompok, mengatur pinjaman (uang panjar) kelompok dari pengusaha pemegang ijin, menyiapkan kebutuhan kelompok dan mengatur serta mengawasi kerja kelompok.

Ketua kelompok tidak harus ikut memungut rotan, walaupun ada ketua kelompok yang juga bergabung dengan anggotanya memungut rotan. Oleh karena itu, seorang ketua kelompok dapat mengkoordinir (menjadi ketua) lebih dari satu kelompok. Sebagai imbalannya, ketua kelompok memperoleh bayaran antara Rp. 30 sampai Rp. 50 per kg rotan yang dihasilkan anggotanya.

Ketua kelompok bertanggung jawab atas pinjaman kelompok kepada perusahaan pemegang ijin. Apabila hasil kerja anggota kelompok nilainya lebih kecil dari pinjaman maka ketua kelompok akan dimarahi dan akan kehilangan kepercayaan dari pengusaha pemegang ijin. Selain itu, penghasilan seorang ketua kelompok tergantung dari hasil kerja anggota kelompok.

Ada juga kelompok pemungut rotan yang berangkat memungut rotan tanpa memiliki ketua kelompok. Mereka umumnya berasal dari Desa Lantantallang dan Desa Pincara. Kelompok seperti ini umumnya berukuran kecil dan menggunakan uangnya sendiri untuk membeli logistik kebutuhan memungut rotan. Ada juga masyarakat Dusun Pampli yang pergi memungut rotan tidak dalam kelompok. Mereka memungut rotan di dalam hutan yang ada di sekitar kampung, pergi pada pagi hari pulang pada sore hari. Karena pemungut rotan seperti ini tidak memiliki hutang/pinjaman, mereka tidak terikat harus menjual hasil rotannya kepada pengusaha tertentu.

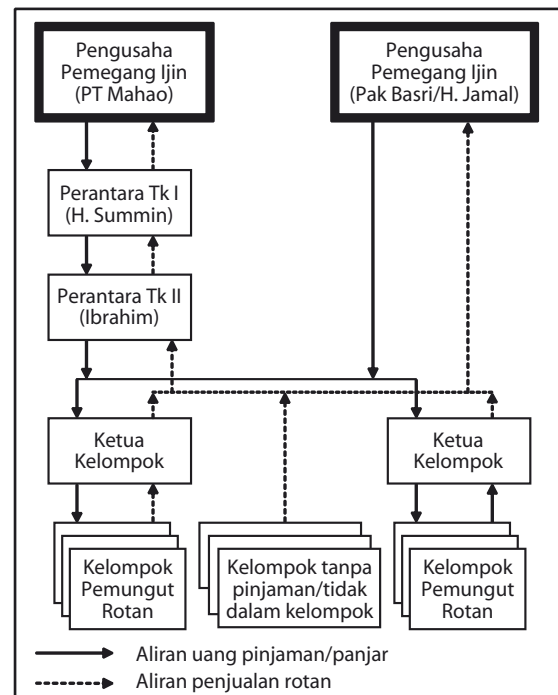
Dari lima perusahaan pemegang ijin pemungutan hasil hutan (IPHH) rotan di Kabupaten Luwu Utara (data akhir tahun 2005), terdapat tiga perusahaan yang membeli rotan dari masyarakat Desa Sepakat yaitu: CV Irsyad, CV Talitawa dan CV Ampana Jaya. Kedua perusahaan terakhir secara langsung berhubungan dengan pemungut rotan melalui ketua kelompoknya, tetapi CV Irsyad tidak demikian. Antara CV Irsyad dengan pemungut rotan (ketua kelompok) masih ada dua orang perantara, yaitu Bapak Ibrahim yang bertugas operasional di lapangan dan Bapak Haji Summin sebagai orang kepercayaan CV Irsyad untuk menyalurkan uang muka. Baik Bapak Ibrahim maupun Bapak Haji Summin mengambil keuntungan dari setiap kg rotan yang disalurkan dari pemungut rotan ke CV Irsyad. Menurut Bapak Ibrahim, dia mengambil Rp 100/kg rotan, tetapi tidak diketahui berapa keuntungan yang diambil oleh Bapak Haji Summin.

Sebagai akibat dari perbedaan pola aliran

uang pinjaman dan penjualan rotan dari pemungut rotan kepada perusahaan pemegang ijin (Gambar 6), akhirnya harga beli rotan pada tingkat pemungut rotan berbeda-beda diantara para pengusaha, dengan kisaran perbedaan antara Rp. 100 sampai Rp.200 atau sekitar 15-30% dari harga rotan (lihat Tabel 10).

CV Ampana Jaya dan CV Talitawa memberikan pinjaman kepada pemungut rotan yang jumlahnya hanya cukup untuk membeli bahan logistik. Panjar juga diberikan jika mereka benar-benar akan pergi memungut rotan. CV Ampana Jaya bahkan sering kali tidak mau memberikan pinjaman karena menurut pengalamannya banyak pemungut rotan menggunakan alasan pergi memungut rotan hanya karena ingin memperoleh pinjaman.

Sementara CV Ampana Jaya segera membayar kepada para pemungut rotan setelah rotan selesai ditimbang, uang penjualan rotan baru dapat dibayarkan CV Talitawa kepada perotan setelah rotan dijual ke pedagang pengumpul yang ada di Makassar. Proses menunggu pembayaran tersebut dapat mencapai satu sampai dua bulan. Adapun yang melalui perantara Bapak Ibrahim, selain uang rotan segera dibayar setelah penimbangan, pinjaman pun mudah. Pinjaman dapat diberikan walaupun saat itu belum akan pergi memungut rotan, misalnya meminjam uang untuk mengikuti pesta, beli rokok, dan kebutuhan lainnya.



Gambar 6. Bagan aliran uang pinjaman/panjar dan penjualan rotan dari pemungut rotan kepada pengusaha pemegang ijin

Apabila perbekalan habis saat pekerjaan sedang berlanjut, kelompok menugaskan salah satu diantara mereka untuk turun ke kampung menemui ketua kelompok (bila ketua kelompok ikut ke hutan maka diayak turun) guna menambah pinjaman untuk membeli perbekalan tambahan. Pada Bapak Ibrahim, pinjaman seperti ini dapat dengan mudah diberikan. Tidak jarang terjadi bahwa, uang yang dipinjam jauh lebih banyak dari rotan yang dihasilkan. Sebagai contoh, Tabel 5 menunjukkan hasil rotan satu kelompok dari Desa Sepakat selama 48 hari. Salah seorang anggota kelompok menyatakan bahwa pinjaman mereka berjumlah Rp. 6.000.000, sementara hasil kerja mereka secara keseluruhan hanya Rp. 2.862.500. Dengan demikian mereka akan terus berhutang dan oleh karena itu pula mereka mau tidak mau harus menjual hasil rotannya kepada Bapak Ibrahim.

Kebijakan Pemerintah tentang Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Hutan

Pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dilakukan melalui ijin dari pemerintah. Pada era otonomi daerah, pemberian perijinan pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan dan dalam kawasan hutan yang dikonversi serta perijinan pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHH) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Melalui kebijakan perijinan, pemerintah dapat mengatur, mengendalikan, dan membina pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan (Perda Kab. Luwu Utara No. 5/2001).

Mungkin karena pada saat menimbun kayu di pinggir jalan atau mengangkut kayu dengan mobil, masyarakat sering ditangkap aparat, umumnya mereka mengerti bahwa untuk menebang pohon di hutan harus ada ijin dari pemerintah. Namun masyarakat umumnya tidak mengerti jika untuk memungut rotan diperlukan ijin. Seberapa banyak pun mereka mampu mengeluarkan rotan dari hutan dan menumpuknya di pinggir sungai, masyarakat tidak akan pernah didatangi oleh aparat. Masalah biasanya baru muncul pada saat rotan diangkut dari kampung ke lokasi penggorengan perusahaan. Apabila truk yang mengangkut rotan tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau jumlah rotan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen, maka rotan yang diangkut dinyatakan sebagai tidak sah dan akan disita oleh aparat.

Ketentuan Perijinan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Ijin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan dikeluarkan oleh Bupati. Pemohon harus memiliki badan usaha seperti PT, CV atau koperasi. Permohonan ijin diajukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Luwu Utara No. 5/2001, persyaratan permohonan ijin usaha bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Proposal rencana perijinan usaha,
- b. Profil badan usaha pemohon (sertifikat badan usaha),
- c. Peta lokasi yang dimohon dengan skala 1: 50.000,
- d. Dasar kepemilikan, status lokasi, keterangan Kepala Desa dan Camat di lokasi yang dimohon, dan
- e. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku

Setiap pemohon ijin dikenakan biaya administrasi dan operasional di lapangan sebesar Rp. 10.000/ha untuk HHBK di luar kawasan hutan, Rp. 100.000/ha untuk kayu di luar kawasan hutan, Rp. 12.000/ha untuk HHBK di dalam kawasan hutan, dan Rp. 150.000/ha untuk kayu di dalam kawasan hutan. Selain biaya tersebut, kepada pemohon sering dikenakan biaya tambahan untuk transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, yang besarnya tergantung dari jauhnya lokasi yang dimohonkan ijin.

Menurut Kepala Bidang Perijinan Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara (pers. com., Sept, 2005), untuk setiap IPHH rotan diberikan ijin untuk memungut rotan dalam kawasan hutan seluas 500 ha selama enam bulan dengan volume tebangan berkisar antara 200 ton sampai dengan 350 ton rotan. Apabila setelah enam bulan dilakukan pemungutan ternyata potensi rotannya masih cukup banyak, maka ijin dapat diperpanjang selama enam bulan berikutnya. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha untuk mendapatkan IPHH rotan dalam lokasi yang luasnya 500 ha adalah Rp. 6.000.000 (di dalam kawasan hutan). Biaya tersebut belum termasuk biaya transportasi petugas dan biaya untuk mendapatkan surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat, serta biaya pembuatan peta.

Melalui ketentuan perizinan, setiap pemegang ijin IPHH rotan diwajibkan untuk membuat pembibitan dan menanam rotan pada

kawasan hutan yang telah diambil rotannya, tetapi tidak ada kewajiban seperti itu pada pemegang IPK (ijin pemanfaatan kayu). Hal tersebut mungkin karena IPK umumnya diberikan untuk memanfaatkan kayu di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan yang dikonversi. Baik pemegang izin IPHH rotan maupun pemegang izin IPK diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat setempat dalam memungut/ memanfaatkan hasil hutan.

Karena pemeriksaan dan pengawasan lapangan tidak pernah benar-benar dilakukan oleh Dinas Hutbun, tidak ada satu pun pengusaha yang mengindahkan ketentuan yang diberlakukan kepadanya. Kenyataannya di lapangan, lokasi memungut rotan masyarakat yang menjadi mitra pengusaha pemegang izin sama sekali tidak terkait dengan lokasi yang tertera dalam peta yang dilampirkan dalam ijin. Seperti yang terlihat pada Gambar 3, pondok pemungut rotan tersebar jauh di luar areal ijin CV Irsyad. Selain itu, pengusaha pemegang ijin tidak saja menerima rotan dari kelompok yang mengambil rotan dari dalam lokasi ijinnya, melainkan juga dari kelompok yang mengambil rotan di dalam lokasi ijin perusahaan lainnya. Masyarakat yang bermitra dengan PT Maharani juga mengambil kayu jauh (antara 1 sampai 2 km) masuk ke dalam kawasan hutan produksi.

PSDH dan Retribusi Kayu

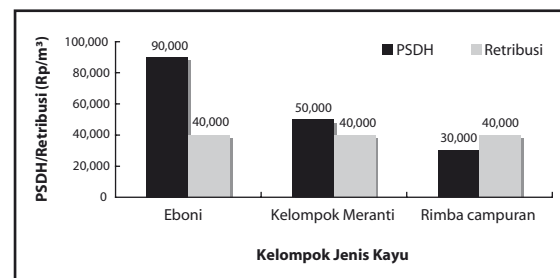
Mengingat IPK diberikan di luar kawasan hutan, maka terhadap kayu yang dimanfaatkan tidak dikenakan pungutan DR (dana reboisasi), melainkan hanya PSDH (provisi sumberdaya hutan) dan retribusi kabupaten. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan retribusi kayu sebesar Rp. 40.000 untuk seluruh jenis kayu, sedangkan nilai PSDH bervariasi menurut kelompok kayu (Gambar 7). Selain PSDH dan retribusi kabupaten, Pemerintah Desa Sepakat juga mengenakan retribusi sebesar Rp. 15.000/m³ untuk kayu yang dibeli oleh pengusaha yang datang ke Desa Sepakat, dan Rp. 5.000/m³ untuk kayu yang dibeli oleh PT Maharani (mitra masyarakat). Menurut Kepala Desa Sepakat, perbedaan tersebut ditetapkan atas pertimbangan bahwa PT Maharani banyak membantu masyarakat Desa Sepakat, seperti perbaikan jembatan, jalan, penerangan, dan bantuan-bantuan lainnya.

Baik PSDH, retribusi kabupaten dan retribusi desa tidak dipungut dari masyarakat,

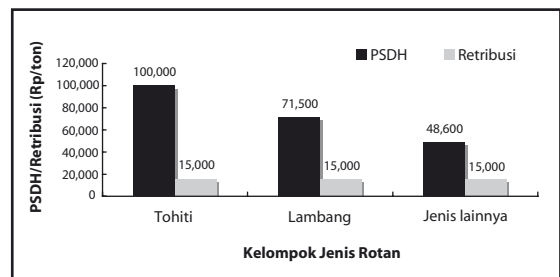
melainkan dari perusahaan mitra masyarakat atau dari perusahaan yang datang membeli kayu ke kampung saat mereka memohon SKSHH untuk mengangkut kayu. Dana yang terkumpul dari pemungutan retribusi kabupaten seluruhnya masuk kas pemerintah kabupaten dalam bentuk PAD, tetapi PSDH disetorkan kepada pemerintah pusat yang kemudian sebagian dikembalikan kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk dana perimbangan. Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerima retribusi sebesar Rp. 198.490.000. Adapun retribusi oleh pemerintah desa tidak jelas jumlah yang terkumpul demikian juga penggunaannya.

PSDH dan Retribusi Rotan serta Kaitannya dengan Harga Rotan

Sama dengan hasil hutan kayu dari IPK, terhadap HHBK rotan juga dikenakan PSDH, retribusi kabupaten dan retribusi desa. Nilai PSDH bervariasi menurut kelompok jenis rotan (Gambar 8). Retribusi kabupaten disamaratakan untuk seluruh jenis sebesar Rp. 15.000/ton. Pemerintah Desa Sepakat menetapkan retribusi sebesar Rp. 10.000/ton (sebelum tahun 2005 hanya sebesar Rp. 5.000/ton). Pada tahun 2005, Kabupaten Luwu Utara berhasil mengumpulkan retribusi rotan sebesar Rp. 30.280.000 dan dimasukkan sebagai PAD. Sama dengan retribusi desa untuk kayu, retribusi desa untuk rotan juga tidak jelas jumlah dan penggunaannya.



Gambar 7. Besarnya PSDH kayu menurut kelompok jenis



Gambar 8. Besarnya PSDH rotan menurut kelompok

Sama dengan yang terjadi pada hasil hutan kayu, PSDH, retribusi kabupaten, maupun retribusi desa untuk rotan dipungut dari pengusaha yang menjadi mitra masyarakat saat mereka mengurus SKSHH untuk mengangkut rotan. Ketika masyarakat keluar dari hutan membawa hasil rotannya, pengusaha akan datang ke Dinas Hutbun untuk menyerahkan LHP (Laporan Hasil Produksi) yang mencantumkan berat (ton) dan jumlah ikat rotan yang dihasilkan. Atas dasar LHP tersebut pihak Dinas Hutbun akan membuat SKSHH dan menetapkan nilai PSDH dan retribusi.

Besarnya nilai pajak mempengaruhi harga rotan pada tingkat pemungut. Sebagai contoh, dengan menghitung jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi untuk perijinan, PSDH, retribusi kabupaten dan desa, dapat diketahui bahwa pengusaha mengeluarkan uang sebesar Rp. 151 untuk satu kg rotan tohiti yang dibelinya. Nilai tersebut akan menjadi lebih besar apabila turut diperhitungkan pungutan tidak resmi yang harus dibayar mulai dari pengurusan SKSHH, selama pengangkutan, dan pungutan lainnya. Dengan alasan tersebut Bapak Ibrahim menetapkan harga rotan tohiti sebagai yang paling murah (Tabel 10), padahal jenis rotan ini memiliki kualitas paling baik.

Gender dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Hutan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Dusun Pampli, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja. Hanya saja menurut macamnya, ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh laki-laki, ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh perempuan, dan ada pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Tabel 16 menunjukkan persentase perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam beberapa macam pekerjaan dari 10 responden rumah tangga yang diwawancarai.

Terdapat kecenderungan bahwa, dalam rumah tangga dimana isteri banyak membantu pekerjaan yang umumnya dikerjakan suami, maka

suami juga membantu isteri dalam mengerjakan pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh isteri. Dua dari 10 responden menyatakan bahwa suami pernah membantu isteri memasak, malahan satu di antara dua responden tersebut menyatakan dia juga membantu isterinya menjaga anak. Sebaliknya, isteri dalam kedua keluarga tersebut membantu semua pekerjaan suami di kebun dan sawah seperti menyiapkan kebun, menyiangi sawah dan kebun, serta menanam tanaman di kebun. Tidak ada seorang pun isteri yang mengaku terlibat dalam membantu suami memungut rotan dan mengambil kayu. Adapun pekerjaan juru masak pemungut rotan atau pengambil kayu umumnya dilakoni oleh wanita muda yang belum menikah.

Pengamatan yang dilakukan tanggal 19 Oktober 2005 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan (ibu-ibu rumah tangga) ikut terlibat dalam pengangkutan kayu dari pinggir sungai ke sawmill PT Maharani (Gambar 9). Di antara 14 orang yang bekerja mengangkut kayu saat itu, sembilan orang adalah perempuan. Satu balak kayu, yang oleh anggota kelompok pengambil kayu biasanya dipikul sendiri atau berdua, digotong oleh lima orang ibu-ibu dengan ongkos Rp. 1.000 per balak. Dalam sekali bekerja (sekitar 2-3 jam) seorang ibu-ibu rata-rata memperoleh upah sekitar Rp. 10.000. Pekerjaan seperti ini hanya ada bila ada kelompok pengambil kayu yang keluar hutan.



Gambar 9. Ibu-ibu rumah tangga bekerja mengangkut kayu balak

Tabel 16. Persentase perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam beberapa macam pekerjaan

No.	Macam Pekerjaan	Persentase (%)	
		Perempuan	Laki-Laki
1.	Menyiapkan sawah	0	100
2.	Menyiapkan kebun	20	100
3.	Menanam padi di sawah	100	0
4.	Menanam tanaman di kebun	30	100
5.	Memelihara/merawat sawah	20	100
6.	Memanen padi di sawah	100	80
7.	Memelihara/menyiangi kebun	50	100
8.	Menjaga anak	100	10
9.	Memasak	100	20
11.	Membelah kayu bakar	100	80
12.	Memungut rotan / mengambil kayu	0	100
13.	Juru masak pemungut rotan/pengambil kayu	100	0
14.	Buruh angkut kayu	100	100
15.	Mengambil udang di sungai dengan serok	100	0
16.	Mengambil udang di sungai dengan battery	0	100

Pembahasan

Hutan sebagai Sumber Penghidupan Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini hutan masih merupakan sumber penghidupan bagi banyak masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Kawasan hutan yang ada di dalam DAS Patikala menjadi tempat bergantung hidup hampir semua masyarakat Dusun Pampli, sebagaimana juga masyarakat Dusun lainnya di Desa Sepakat dan desa tetangganya (Desa Lantantallang dan Desa Pincara). Rotan adalah hasil hutan yang paling banyak diambil oleh masyarakat. Dari 33.829 ha luas wilayah DAS Patikala, masyarakat hanya mengambil rotan dalam kawasan hutan yang tergolong APL dan HPT yang luasnya hanya 13.178 ha. Masyarakat tidak mengambil rotan sampai ke kawasan hutan lindung karena lokasinya yang terlalu jauh. Dari dalam kawasan hutan tersebut, dalam periode waktu lima minggu, 96 orang pemungut rotan menghasilkan sebanyak 100.383 kg rotan dengan nilai jual Rp. 68.804.925. Dari nilai tersebut dapat dihitung bahwa, jika diperhitungkan dari harga rotan saat ini (Oktober 2005), dalam setahun dari dalam kawasan hutan tersebut dapat dihasilkan rotan senilai Rp. 707.707.800.

Kegiatan memungut rotan sudah menjadi pekerjaan pokok masyarakat Desa Sepakat, khususnya Dusun Pampli sejak beberapa generasi sebelumnya. Walaupun belakangan ada kecenderungan bahwa rotan yang diambil semakin muda, volume rotan yang dihasilkan dari dalam kawasan hutan tersebut masih stabil dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan hasil hutan kayu, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penebangan oleh HPH PT Panply, kini hampir tidak ada lagi tersisa pohon masak tebang dari jenis-jenis komersil.

Dibandingkan dengan pengusaha hasil hutan kayu, pengurusan perijinan pemungutan rotan relatif lebih mudah dan tidak memerlukan investasi yang besar. Setiap masyarakat dapat pergi ke hutan untuk memungut rotan kapan pun mereka mau. Pada waktu-waktu tertentu, masyarakat dari Masamba atau bahkan dari kecamatan lain pun ikut memungut rotan di dalam kawasan hutan DAS Patikala, tetapi berbeda dengan masyarakat Desa Sepakat dan Desa Lantantallang, bagi masyarakat dari luar, memungut rotan bukanlah pekerjaan pokoknya. Mereka hanya datang memungut rotan pada saat dimana harga rotan cukup tinggi atau saat mereka membutuhkan biaya untuk mengolah kebun atau sawah mereka, seperti untuk membeli pestisida, herbisida atau pupuk. Dilihat dari hal ini, rotan bukan saja memberikan penghidupan bagi masyarakat hutan, melainkan juga bagi masyarakat kota yang membutuhkan uang.

Selain kayu dan rotan, masih banyak produk-produk hayati hutan lainnya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik untuk kebutuhan sandang, pangan, maupun obat-obatan. Hanya saja karena produk seperti itu tidak beredar di pasaran, nilainya seakan diabaikan. Sebagai contoh mungkin tidak banyak yang pernah berpikir berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan oleh 37 kepala keluarga di Dusun Pampli apabila mereka tidak lagi dapat memperoleh kayu bakar, udang dan ikan, sayuran serta bahan obat-obatan dari dalam hutan di sekitar kampung mereka?

Sayang sekali bahwa, masyarakat yang menyadari dirinya bergantung hidup dari sumberdaya hayati hutan tersebut tidak menganggap perlu untuk mengatur pengambilan sumberdaya hayati dari hutan. Mereka seharusnya sangat mengerti bahwa, lokasi memungut rotan yang semakin jauh mengindikasikan populasi

rotan di dalam hutan semakin berkurang. Namun mereka tidak berupaya membudidayakan sumberdaya hayati hutan di dalam kebun atau lahan yang mereka onkko. Hanya karena tidak ingin diatur, masyarakat Desa Sepakat selalu menyatakan bahwa rotan dan kayu tidak akan pernah habis dari hutan. Mungkin karena tingkat pendidikannya yang rata-rata rendah, mereka tidak sadar bahwa cara mereka memanfaatkan sumberdaya hayati hutan saat ini mengancam masa depan kehidupan mereka.

Mengapa Masyarakat Hutan Umumnya Miskin

Dengan harga rotan saat ini, seorang pemungut rotan dewasa yang giat bekerja dapat menghasilkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 dalam waktu sekitar tiga minggu (Tabel 7). Penghasilan seorang pemungut rotan tersebut kurang lebih sama dengan gaji sebulan seorang pegawai negeri atau gaji seorang karyawan perusahaan tingkat menengah yang tinggal di kota. Berbeda dengan di kota, di kampung tidak semua bahan kebutuhan sehari-hari harus dibeli. Sebagian besar kebutuhan sayuran bisa didapat dari hutan atau kebun. Demikian juga kebutuhan terhadap beras atau sagu (makanan pokok sebelum mereka mengenal beras) dipenuhi dari hasil sawah atau hutan. Namun demikian, mengapa kehidupan masyarakat pemungut rotan nampak kurang sejahtera? Pengambil kayu yang pendapatannya sedikit lebih baik dari pemungut rotan pun nampak tidak sejahtera pegawai negeri atau karyawan perusahaan yang tinggal di kota. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut, berikut ini dicoba dianalisis beberapa faktor internal masyarakat berkaitan dengan gaya hidup dan beberapa faktor eksternal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pemungut rotan di Desa Sepakat, khususnya Dusun Pampli.

a. Faktor Internal: Jumlah tanggungan/anak
Karena tidak ada yang mengikuti program keluarga berencana, tingkat kelahiran di desa ini sangat tinggi. Mengingat usia menikah juga relatif muda, bukan hal yang mengherankan apabila seorang responden mengaku punya anak 13 orang. Walaupun sebagian kebutuhan hidup di kampung tidak dibeli, tentunya tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk membesarkan 13 orang anak.

b. Faktor Internal: Kebutuhan rokok dan kebiasaan berjudi

Pemungut rotan atau pengambil kayu yang masih bujang mengaku menghabiskan rokok rata-rata 2 bungkus dalam sehari (sekitar Rp. 5.000/bungkus). Jumlah tersebut dapat menjadi lebih banyak apabila mereka melewatkan waktu malam di hutan dengan bermain kartu/judi. Pemungut rotan yang sudah berkeluarga juga banyak merokok, namun mereka mengakali pengeluaran untuk rokok dengan membuat rokok sendiri dari tembakau Bugis yang kandungan nikotin dan tarnya sangat tinggi. Dengan cara itu, mereka dapat menekan pengeluaran untuk rokok, namun kesehatan mereka cepat merosot.

c. Faktor Internal: Rendahnya semangat kerja
Pemungut rotan dari Dusun Pampli, atau Desa Sepakat secara umum, setiap harinya terlalu cepat berhenti bekerja. Mereka sudah berhenti bekerja pada pukul 13:00, bahkan ada yang pukul 11:00. Jika waktu sore juga dimanfaatkan untuk bekerja, tentunya rotan yang dapat dikumpulkan akan lebih banyak lagi.

d. Faktor Internal: Rendahnya tingkat pendidikan
Hanya beberapa orang masyarakat Dusun Pampli yang berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ke atas. Sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) dan sebagian lagi tidak tamat sekolah. Tingkat pendidikan umumnya menentukan kemampuan seseorang untuk menatap dan merencanakan masa depannya.

e. Faktor Eksternal: Peralatan/fasilitas kerja
Setiap kali masuk hutan, seorang pemungut rotan atau pengambil kayu memerlukan satu pasang sepatu karet (Rp. 25.000), satu pasang sandal jepit (Rp. 6.000), satu kaos kaki anti pacet (Rp. 12.000), dan sekurang-kurangnya 1 stel pakaian lapangan/bekas (Rp. 30.000). Karena pekerjaannya berat (di tempat basah, berlumpur dan berduri), peralatan kerja tersebut umumnya tidak dapat dipergunakan dua kali.

f. Faktor Eksternal: Mahalnya biaya transportasi
Karena prasarana transportasi belum baik, jasa transportasi dari Desa Sepakat ke ibu kota Masamba dilayani oleh ojek. Ongkos ojek satu kali jalan dari pusat Desa Sepakat

ke Masamba (ibukota Kabupaten Luwu Utara) yang jaraknya sekitar 11,5 km adalah Rp. 15.000 (Rp. 25.000 dari Dusun Pampli) atau lebih mahal lagi saat musim hujan. Sebagai perbandingan, ongkos angkot di kota Makassar untuk jarak tempuh sekitar 10 km hanyalah Rp. 2.000.

- g. Faktor Eksternal: Pungutan tidak resmi
Pungutan tidak resmi oleh oknum aparat memang tidak dilakukan kepada para pemungut rotan, melainkan kepada pengusaha pembeli rotan. Namun demikian, para pengusaha akan membebankan semua uang yang pernah dikeluarkannya kepada para pemungut rotan dengan menekan harga beli rotan.

Rantai Perdagangan yang Panjang dan Rendahnya Harga Rotan

Sebuah perusahaan penampung hasil rotan di Makassar, CV Firma Kali Jaya, membeli rotan kering goreng kategori asalan (mutu bukan super) dari jenis rotan batang dengan harga bervariasi antara Rp. 2.100 sampai Rp. 3.500 dan rotan lambang dengan harga bervariasi antara Rp. 2.600 sampai 3.000 sesuai ukuran diameter (Tabel 17). Apabila selama proses penggorengan dan pengeringan terjadi penyusutan berat sekitar 20 % (Pers Com. Ibrahim, Oktober 2005), maka dapat dihitung bahwa harga rotan kering di tingkat pemungut rotan hanyalah Rp. 1.125 untuk rotan batang diameter 30-38 mm dan Rp. 812,5 untuk rotan lambang. Nilai tersebut kurang lebih sepertiga dari harga rotan di Makassar.

Panjangnya rantai perdagangan di antara masyarakat pemungut rotan dan pembeli di kota Makassar merupakan faktor utama penyebab besarnya perbedaan harga rotan di tingkat masyarakat dan pembeli di Makassar. Antara masyarakat pemungut rotan dengan pembeli di

Makassar terdapat dua sampai tiga matarantai, yang setiap mata rantai mengambil margin. Panjangnya matarantai tersebut erat kaitannya dengan ketidakberdayaan masyarakat pemungut rotan secara ekonomi serta rendahnya kapasitas mereka dalam pengelolaan dan pengolahan rotan. Seandainya masyarakat dapat berkelompok dan membentuk koperasi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mengolah rotan, tentunya mereka dapat berhubungan langsung dengan pembeli dari Makassar, sehingga harga rotan di tingkat masyarakat pemungut rotan dapat meningkat.

Ketidakterpikirkan Pemerintah kepada Masyarakat Pemungut Rotan

Pada dasawarsa 1970-an, 80% sampai 90% kebutuhan rotan mentah dunia dipasok dari Indonesia (Dransfield dan Manokaran 1996; FAO, 2001). Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga rotan dunia, sehingga harga beli rotan pada tingkat pemungut rotan dapat ditingkatkan. Namun menurut analisis WALHI (2004), pemerintah justru memihak kepada elite industri dengan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor rotan. Pada tahun 1986, Menteri Perdagangan mengeluarkan SK (surat keputusan) No. 274/Kp/XI/1986 tentang Pelarangan Ekspor Rotan Asalan yang kemudian disusul dengan SK Menteri Perdagangan No. 190/Kpts/VI/1988 tentang Pelarangan Ekspor Rotan Setengah Jadi. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut harga rotan pada tingkat pemungut rotan terus merosot mencapai nilai terendah Rp. 250/kg dari sebelumnya Rp. 780/kg. Setelah larangan ekspor dicabut, harga rotan pada tingkat pemungut rotan merangkak naik kembali menjadi Rp. 900/kg pada pertengahan 2004 (WALHI, 2004).

Tabel 17. Harga beli rotan batang dan lambang kering goreng kategori asalan pada tingkat pengumpul di kota Makassar

No.	Jenis dan Kualitas Rotan	Harga (Rp.)
1.	Rotan Batang: Dim < 25 mm	2.500
	Dim 23-30 mm	3.000
	Dim 30-38 mm	3.500
	Dim > 38 mm	2.100
2.	Rotan Lambang: Dim 10-14 cm	2.600
	Dim > 14 mm	3.000

Sumber: CV. Firma Kali Jaya, berlaku tanggal 18 November 2005

Sejak tahun 1922, Singapore merupakan pusat perdagangan rotan yang berasal dari Asia tenggara dengan tujuan ekspor ke Hongkong, Amerika Serikat dan Perancis. Singapura yang bukan merupakan daerah asal rotan mencatat devisa sebesar US\$ 21.000.000 pada tahun 1977 dari memproses rotan menjadi produk setengah jadi (Menon, 1980). Dalam tahun yang sama, Hongkong yang juga melakukan hal yang sama dengan Singapura memperoleh devisa sebesar US\$ 42.000.000. Sementara itu, Indonesia yang memasok 90% kebutuhan rotan kepada kedua negara tersebut hanya mencatat devisa sebesar US\$ 15.000.000 atau kurang dari seperempat dari yang diperoleh Singapore dan Hongkong (Dransfield dan Manokaran 1996).

Melihat besarnya keuntungan yang didapatkan oleh Singapore dan Hongkong hanya dengan mengolah rotan asalan menjadi rotan setengah jadi, adalah sangat alamiah jika lantas Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengolah rotannya sendiri dan melarang ekspor rotan mentah (tahun 1986) dan rotan setengah jadi (tahun 1988). Namun muncul pertanyaan apakah dengan kebijakan pelarangan ekspor tersebut akhirnya pemerintah telah berhasil mendapatkan devisa yang sebelumnya diterima oleh Singapore dan Hongkong? Secara perhitungan ekonomi sederhana, seharusnya jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “ya”. Lantas, mengapa harga rotan pada tingkat petani harus jatuh mencapai titik terendah dan mengapa setelah larangan ekspor dicabut harga rotan kembali meningkat?

Apapun alasannya, fakta di atas menjelaskan bahwa pemerintah dan dunia usaha di Indonesia telah gagal mengatur tataniaga rotan. Kebijakan pemerintah tersebut telah terbukti justru menjerumuskan masyarakat pemungut rotan dalam kemelaratan. Namun yang jelas, pasti ada pihak yang diuntungkan. Mungkin bagi para ahli ekonomi fakta tersebut di atas sulit untuk difahami, tetapi itulah yang mudah terjadi di Indonesia.

Masa Depan Hasil Hutan Rotan di Desa Sepakat

Tidak semua jenis rotan diketahui laju pertumbuhan panjang batangnya. Data yang ada menunjukkan bahwa jenis rotan yang pertumbuhan panjangnya paling cepat adalah *Calamus trachycoleus* (5 m/tahun) dan yang paling lambat adalah *Daemonorops gameculata* (0.21 m/tahun) (Januminro, 2000). Di antara rotan yang ada di Sulawesi, hanya rotan tohiti yang diketahui laju pertumbuhan panjang batangnya yaitu antara 2 - 3 m/tahun. Namun para pemungut rotan menyatakan bahwa pertumbuhan rotan jauh lebih cepat dari itu.

Pengamatan terhadap batang rotan yang ditebang oleh para pemungut rotan di Minoto menunjukkan bahwa batang rotan yang secara ekonomis menguntungkan untuk ditebang adalah yang telah dapat menghasilkan minimal 6 potong dengan ukuran panjang per potong adalah 4.5 m. Karena terlalu muda (keriput jika dikeringkan), bagian batang yang berada pada jarak sampai 12 m dari pucuk belum memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, idealnya batang rotan yang menguntungkan untuk ditebang adalah batang yang telah memiliki panjang total lebih dari 39 m, terdiri dari 27 m (6 potong) batang ekonomis dan 12 m sisanya merupakan batang muda. Apabila diambil rata-rata bahwa laju pertumbuhan batang rotan adalah 2 m/tahun, maka untuk mencapai panjang rotan ideal untuk ditebang dibutuhkan waktu sekitar 18 tahun.

Walaupun dapat juga secara vegetatif (tunas dari akar), regenerasi rotan yang efektif adalah secara generatif (biji). Penebangan batang rotan yang masih terlalu muda berarti tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada batang tersebut untuk beregenerasi secara generatif, karena belum sempat berbuah. Khusus untuk rotan batang tokoi dan rotan tohiti yang merupakan rotan yang tidak bertunas dan oleh karena itu tidak berumpun, penebangan rotan muda berarti tidak memberikan sama sekali kesempatan bagi rotan tersebut untuk beregenerasi secara alami.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

HHBK merupakan sumberdaya hayati yang paling bernilai dari hutan. Selain nilai ekonominya yang jauh lebih besar dari kayu, pemungutan HHBK tidak menyebabkan kerusakan hutan, sehingga tidak akan mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi dan nilai jasa dari hutan.

Kontribusi HHBK terhadap kehidupan masyarakat Dusun Pampli selain sangat berarti secara ekonomi juga lebih merata dibandingkan dengan kayu. Manfaat dari kayu hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu saja, yaitu mereka yang memiliki modal paling kurang satu unit *chainsaw*. Setiap masyarakat di Dusun Pampli dapat memungut rotan kapan pun mereka memerlukan uang.

HHBK yang melimpah bukannya membuat masyarakat Dusun Pampli hidup sejahtera, melainkan cenderung sebaliknya. Karena sumberdaya hayati hutan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kapan pun mereka kehendaki, ada kecenderungan bahwa, masyarakat Dusun Pampli menjadi manja. Saat ini mereka bukan saja tidak berupaya tetapi juga tidak berpikir bagaimana agar manfaat dari sumberdaya hayati hutan tersebut dapat diperoleh secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat Dusun Pampli memerlukan bimbingan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan sumberdaya hayati hutan secara optimal dan berkelanjutan. Apa yang terjadi terhadap masyarakat Dusun Pampli, bukan mustahil juga terjadi terhadap masyarakat hutan lainnya di Kabupaten Luwu Utara, maupun di daerah lainnya di Indonesia.

Rekomendasi

Mengingat sebagian besar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Luwu Utara berstatus hutan lindung dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai HHBK lebih besar dari kayu, masyarakat perlu didorong untuk lebih memanfaatkan HHBK dari pada kayu.

Untuk menjamin keberlanjutan produksi HHBK, perlu dilakukan pengaturan pemungutannya. Ketentuan perijinan pemungutan hasil hutan sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur agar hasil hutan yang diperoleh dapat secara optimal dan berkelanjutan. Aturan perizinan harus dibarengi dengan kesungguhan petugas kehutanan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan lapangan, karena bila tidak, maka perijinan akan semata-mata berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana baik yang legal maupun tidak legal, sementara sumberdaya hayati hutan akan hancur.

Masyarakat hutan, khususnya di Dusun Pampli Desa Sepakat, perlu mendapatkan bimbingan dari pemerintah atau pendampingan dari LSM untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya dari memanfaatkan HHBK. Sebaliknya, masyarakat sendiri perlu memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena tanpa komitmen yang kuat dari masyarakat sendiri, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM akan sia-sia.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga perlu memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam pengurusan ijin dan memberikan perlindungan kepada mereka dari berbagai pungutan tidak resmi oknum petugas dan oknum aparat, mengingat semua pengeluaran dari pengusaha akan dibebankan kepada masyarakat dengan cara menekan harga HHBK.

Masyarakat seharusnya tidak hanya berharap dari sumberdaya hayati yang ada di alam/hutan. Mereka sebaiknya juga membudidayakan sumberdaya hayati hutan - terutama rotan batang - di dalam kebun atau tanah ongo mereka. Tanaman rotan tidak memerlukan pemeliharaan, dalam arti sekali ditanam selanjutnya hanya menunggu hasil. Apabila masyarakat yang saat ini berumur 30 tahun mulai menanam rotan,

maka pada umur 48 tahun (18 tahun kemudian) rotan yang mereka tanam di kebun sudah dapat dipanen. Rotan batang yang telah berumur 18 tahun dapat mencapai panjang 39 m dan dapat dibagi menjadi 6 potong dengan berat rata-rata 6-7 kg per potong. Dengan demikian 1 batang rotan batang akan bernilai sekitar Rp. 28.000 (bila Rp. 800/kg).

Daftar Pustaka

- Dransfield, J. dan N. Manokaran. 1996. *Sumberdaya Nabati Asia tenggara 6* (Terjemahan). Gajah Mada University Press – Prosea Indonesia. Yogyakarta, Bogor.
- FAO. 2001. *Unasylva*. No. 205: 52.
- FWI/GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch
- Gillis, M. 1986. *Non-wood Forest Products in Indonesia*. Department of Forestry, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.
- Gupta, T. A. and A. Guleria. 1982. *Non-wood Forest Products from India*. IBH Publishing Co., New Delhi.
- Januminro, CFM. 2000. *Rotan Indonesia*. Kansius, Yogyakarta.
- Menon, K.D. 1980. Rattans: A state-of-the-art review. In: *Rattan* (a report of a workshop held in Singapura, 4-6 June 1979. International Development Research Centre, Canada.
- Ngakan, P.O., A. Achmad, D. William, K. Lahae, and A. Tako. 2005. *The Dynamics of Decentralisation System in the Forestry Sector in South Sulawesi: Hystory, Realisties and Challenges towards Autonomus Governance*. Hasanuddin University and CIFOR.
- Primack, R. B. 1993. *Essentials of Conservation Biology*. Sinauer Associates Inc.
- WALHI. 2004. *DEPPERINDAG Memiskinkan Petani Rotan: Pelarangan ekspor rotan mentah hanya akan rugikan petani*. http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/hut_depp... Diakses 23 Oktober 2005 pukul 12:36.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2004, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Kanada, Carrefour, Cina, CIRAD, Conservation International Foundation (CIF), Komisi Eropa, Finlandia, FAO, Ford Foundation, Perancis, Jerman Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), Italy, Japan, Korea, Belanda, Norwegia, Organisation Africaine du Bois (OAB), Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable Resources (INRENA), Filipina, Swedia, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Swiss, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Amerika Serikat, Inggris, United Nations Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).



ISBN 979-24-4666-4



Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.